

# Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat



Akhmadi

Rachma Indah Nurbani

Pitri Solihah

Fathul Rahman

**LAPORAN LAPANGAN SMERU**

**Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar  
di Kabupaten Sumbawa, Provinsi  
Nusa Tenggara Barat**

Akhmadi

Rachma Indah Nurbani

Pitri Solihah

Fathul Rahman

**Editor**

Fandi Muhammad H.

**The SMERU Research Institute**

**Februari 2020**

# Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penulis: Akhmadi, Rachma Indah Nurbani, Pitri Solihah, dan Fathul Rahman

Editor: Fandi Muhammad H.

Foto Sampul: Dok. SMERU

Data Katalog-dalam-Terbitan The SMERU Research Institute

Akhmadi

Laporan lapangan SMERU: Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa - Provinsi Nusa Tenggara Barat./ Ditulis oleh Akhmadi, Rachma Indah Nurbani, Pitri Solihah, Fathul Rahman.

v; 71 hlm.; 29 cm.

ISBN 978-602-7901-57-5 (PDF)

ISBN 978-623-7492-19-1

1. Pendidikan      2. Kabupaten Sumbawa

I. Judul

370.7 –ddc 23

Diterbitkan Oleh:

The SMERU Research Institute

Jl. Cikini Raya No.10A

Jakarta 10330

Indonesia

Cetakan pertama, Februari 2020



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id); atau kunjungi situs web [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).

# TIM PENELITIAN

## **Peneliti SMERU**

Akhmadi

Rachma Indah Nurbani

## **Peneliti Lapangan**

Pitri Solihah

Fathul Rahman

# UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini dapat diselesaikan berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh tim Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (The Innovation for Indonesia's School Children, INOVASI) yang telah memfasilitasi dan memberi arahan teknis selama pelaksanaan penelitian ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, khususnya bupati, sekretaris daerah, dan kepala badan/dinas di bidang pendidikan beserta stafnya, yang telah memperlancar dan memberikan informasi berharga sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada para informan kunci di bidang pendidikan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa atas informasi berharga yang telah diberikan. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid yang telah bersedia meluangkan waktu mereka untuk diwawancarai. Terakhir, kami berterima kasih kepada para peneliti di Kabupaten Sumbawa dan peneliti tamu yang telah membantu tim peneliti SMERU dalam melakukan wawancara dan diskusi kelompok terfokus untuk mengumpulkan informasi di lapangan.

## Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Akhmadi, Rachma Indah Nurbani, Pitri Solihah, dan Fathul Rahman

Dalam rangka mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar murid pendidikan dasar dan memfasilitasi pemanfaatan bukti tersebut untuk kebijakan pendidikan yang lebih baik, Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) bekerja sama dengan The SMERU Research Institute dalam melakukan studi diagnostik pembelajaran pendidikan dasar. Studi dilaksanakan di enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat; salah satunya di Kabupaten Sumbawa. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan informasi dikumpulkan melalui wawancara individu, wawancara kelompok, dan diskusi kelompok terfokus yang dilakukan pada 17–28 Juli 2016. Hasil studi menunjukkan bahwa hasil pembelajaran pendidikan yang masih rendah di kabupaten ini disebabkan berbagai hal terkait persoalan guru (jumlah, distribusi, kualitas/mutu, rotasi, dan perilaku guru), rendahnya dukungan orang tua murid, dan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Inovasi terkait pembelajaran murid yang dilaksanakan daerah berkaitan dengan aspek pembiayaan sekolah, peningkatan kapasitas guru, dan insentif guru. Namun, inovasi tersebut belum berdampak nyata terhadap hasil pembelajaran murid, antara lain, karena besaran dan cakupan program yang terbatas serta tidak adanya kepastian keberlanjutan program. Bidang pendidikan dasar melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi pembuat kebijakan maupun pelaksanaan dan pendukungnya. Mereka memiliki tingkat ketertarikan, pengaruh, dan kewenangan yang berbeda-beda dalam upaya penyelesaian masalah pembelajaran murid. Guru dan kepala sekolah dianggap sebagai aktor utama dalam upaya peningkatan hasil pembelajaran murid. Sementara itu, komunikasi antarpemangku kepentingan dalam rangka membahas permasalahan rendahnya hasil pembelajaran murid akhirnya bermuara pada keterbatasan anggaran dan ketiadaan kebijakan yang mendukung upaya tersebut.

Kata kunci: pendidikan dasar, permasalahan, inovasi, anggaran

# DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Metode Penelitian	1
II. ANALISIS EKONOMI POLITIK PERMASALAHAN PENDIDIKAN DASAR	2
2.1 Persoalan Guru	2
2.2 Dukungan Orang Tua	4
2.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan	5
III. ANALISIS INOVASI DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN	6
IV. PEMETAAN KEPENTINGAN, PENGARUH, DAN HUBUNGAN ANTARPEMANGKU KEPENTINGAN	8
4.1 Potensi untuk Berkontribusi terhadap Hasil Pembelajaran	8
4.2 Kemauan Pemangku Kepentingan untuk Terlibat dalam Peningkatan Hasil Pembelajaran	8
4.3 Pengaruh Aktual Pemangku Kepentingan dalam Pembelajaran	9
4.4 Pentingnya Pemangku Kepentingan Dilibatkan dalam Proses Peningkatan Hasil Pembelajaran	9
4.5 Kemauan Politik sebagai Akar Permasalahan: Anggaran dan Kebijakan	9
LAMPIRAN	14

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis Penyelesaian Masalah	10
Tabel 2. Inovasi di Bidang Pendidikan Dasar	12

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Ringkasan 10 Isu Teratas	15
Lampiran 2. Tabel A1. Ringkasan Metode Komunikasi	23
Lampiran 3. Daftar Mitra Daerah Potensial untuk Inovasi dan Forum untuk Dialog	32
Lampiran 4. Tabel A2. Matriks Nilai Pemangku Kepentingan	33
Lampiran 5. Peta Pemangku Kepentingan	39
Lampiran 6. Analisis Jejaring Pemangku Kepentingan	40
Lampiran 7. Tabel A3. Matrik Metode Komunikasi	42
Lampiran 8. Analisis Pohon Masalah	56
Lampiran 9. Tabel A4. Analisis Penyelesaian Masalah	60
Lampiran 10. Tabel A5. Database Inovasi Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa, 2005–2016	62
Lampiran 11. Tabel A6. Daftar Perolehan Data Sekunder	65
Lampiran 12. Tabel A7. Matrik Proses Pemetaan Pemangku Kepentingan	67

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

3T	terpencil, terluar, dan tertinggal
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade
Diknas	Pendidikan Nasional
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	<i>focus group discussion</i> (diskusi kelompok terfokus)
FIG	Forum Ilmiah Guru
GTT	guru tidak tetap
INOVASI	The Innovation for Indonesia's School Children (Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia)
IPK	indeks prestasi kumulatif
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
KKG	kelompok kerja guru
LCD	<i>liquid crystal display</i>
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
ornop	organisasi nonpemerintah
NTB	Nusa Tenggara Barat
Permendiknas	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia
PNS	pegawai negeri sipil
PMPTK	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPP	rencana pelaksanaan pembelajaran
SD	sekolah dasar
SKPD	satuan kerja perangkat daerah
SMP	sekolah menengah pertama
SMS	<i>short message service</i> (layanan pesan singkat)
surel	surat elektronik
UPTD	unit pelaksana teknis daerah

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu dari enam kabupaten sampel Survei Diagnostik Sistem Pendidikan Dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Survei ini dilaksanakan berkaitan dengan dipilihnya Provinsi NTB sebagai mitra pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) untuk Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI). Program ini bertujuan (i) mengumpulkan bukti tentang apa yang berhasil dan dalam situasi bagaimana hasil belajar murid pendidikan dasar meningkat dan (ii) memfasilitasi pemanfaatan bukti tersebut untuk kebijakan pendidikan yang lebih berarti dan mengubah praktik ke arah lebih baik.

Laporan ini merupakan temuan tentang sistem pendidikan dasar di Kabupaten Sumbawa yang berkaitan dengan hasil pembelajaran murid pendidikan dasar, khususnya mengenai kemampuan literasi dan numerasi murid.

## 1.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan meliputi data primer melalui wawancara, baik individu maupun kelompok, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) dan data sekunder dari lembaga/instansi terkait. Pemangku kepentingan yang diwawancarai meliputi pemangku kepentingan di tingkat kabupaten hingga tingkat sekolah sampel, sedangkan informan yang diwawancarai secara kelompok meliputi empat kelompok guru, empat kelompok orang tua murid, empat kelompok murid laki-laki, dan empat kelompok murid perempuan dari murid-murid SD dan SMP sampel. Sementara itu, FGD dilakukan di Kabupaten Sumbawa dengan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten yang meliputi pejabat Bappeda, Dinas Pendidikan Nasional (Diknas), dan Dewan Pendidikan; anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang membidangi pendidikan; akademisi; koordinator pengawas sekolah; pemerhati pendidikan; kepala kantor perpustakaan daerah; media Radar Sumbawa; lembaga penyelenggara pendidikan dasar (Nahdlatul Wathan dan sekolah komunitas); dan kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di dua kecamatan tempat sekolah sampel berada.

Sekolah sampel meliputi empat sekolah yang terdiri atas dua sekolah dasar (SD A dan SD B) dan dua sekolah menengah pertama di Moyohulu (SMP A) dan Plampang (SMP B). Seluruh sekolah yang disurvei adalah sekolah negeri dan SMP B merupakan sekolah satu atap (satap). Survei dilakukan pada 17–28 Juli 2016 oleh tiga peneliti SMERU, seorang peneliti tamu, dan seorang peneliti setempat.

## II. ANALISIS EKONOMI POLITIK PERMASALAHAN PENDIDIKAN DASAR

Selama ini, persoalan guru merupakan penyebab rendahnya hasil pembelajaran murid pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Sumbawa. Dari berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan, guru (sekolah dan kepala sekolah) menjadi aktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap hasil pembelajaran murid. Namun, guru bukan satu-satunya penyebab rendahnya hasil pembelajaran murid. Penyebab lainnya adalah rendahnya dukungan orang tua murid dan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Untuk sekolah-sekolah yang tidak ada kepala sekolahnya, jabatan kepala sekolah dirangkap oleh kepala sekolah dari sekolah lain, atau dipegang oleh guru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

### 2.1 Persoalan Guru

Permasalahan guru di Kabupaten Sumbawa mencakup jumlah, distribusi, kualitas, rotasi, dan perilaku guru. Jumlah guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Sumbawa masih kurang. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten setempat menutupi kekurangan guru tersebut dengan mengangkat guru honorer atau non-PNS. Terdapat perbedaan antara guru PNS dan guru honorer dalam hal penempatan guru dan kesejahteraannya. Pada umumnya, guru honorer ditempatkan di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) karena rendahnya potensi masyarakat setempat untuk menjadi guru. Sementara itu, persoalan kesejahteraan guru dialami oleh guru-guru honorer dan tidak terjadi pada guru PNS. Dinas Diknas paling banyak menyoroti isu guru terkait belum adanya kesesuaian rasio guru dan murid; terbatasnya potensi masyarakat di daerah terpencil untuk menjadi guru; masalah distribusi guru, termasuk guru mata pelajaran; masalah perilaku guru dan stagnasi peningkatan kualitas guru akibat guru terjebak dalam zona nyaman; dan perpindahan dan rotasi guru yang sangat minim.

Kualitas guru adalah aspek yang langsung berpengaruh terhadap hasil pembelajaran murid. Kualitas guru berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman mengajar guru, serta pemahaman dan kemampuan guru dalam mengimplementasikan perubahan kurikulum. Menurut Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru, persyaratan kualifikasi guru harus minimal S-1 atau D-4. Persyaratan tersebut sudah terpenuhi pada sebagian besar sekolah di Kabupaten Sumbawa. Bahkan, terdapat sekitar 10% guru yang telah berpendidikan S-2.

Berbagai pihak percaya bahwa guru merupakan aktor kunci dalam upaya peningkatan pembelajaran murid. Akan tetapi, terdapat berbagai tantangan yang harus segera ditanggulangi untuk memastikan guru menjalankan perannya tersebut dengan lebih baik. Permasalahan yang terkait dengan kualitas guru, metode mengajar, serta jumlah dan distribusi guru menjadi akar penyebab tidak berjalannya peran guru dengan optimal. Pada beberapa kesempatan wawancara dan diskusi, kami menangkap kekhawatiran beberapa pihak tentang kualitas guru, terutama terkait dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Walau sifatnya kasuistik, beberapa pihak mengeluhkan perilaku sebagian guru yang menempuh pendidikan hanya demi gelar yang kualitas akademisnya tidak terjamin. Upaya untuk meningkatkan kualitas guru juga menemui kendala dengan terbatasnya jumlah pelatihan dan sumber daya pelatih. Salah seorang guru SMP yang ditemui mengeluhkan "*pelatih yang itu-itu saja*". Namun, untuk bisa mendatangkan pelatih dari luar Sumbawa dibutuhkan dukungan dana yang besar. Untuk sementara, guru-guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) lebih banyak mengandalkan iuran swadaya dari

anggota yang berasal dari “ongkos” transportasi yang mereka dapat dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Salah satu bentuk penggunaan dana BOS oleh sekolah adalah pembiayaan transportasi guru yang mengikuti pelatihan. Selain memberikan kesempatan bagi guru untuk memperoleh pelatihan, forum-forum seperti KKG dan MGMP dianggap sebagai salah satu prakarsa untuk meningkatkan kualitas guru dan sebagai wadah untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama. Akan tetapi, minimnya pendanaan menjadi salah satu penyebab vakumnya kegiatan kelompok-kelompok MGMP. MGMP yang aktif di Kabupaten Sumbawa adalah MGMP Bahasa Inggris, sedangkan MGMP mata pelajaran lainnya kurang atau bahkan tidak aktif. MGMP Bahasa Inggris dimulai pada 2010 oleh guru-guru Bahasa Inggris di Kabupaten Sumbawa untuk membuat kelompok yang diberi nama English Teacher Samawa. Komunikasi antaranggota dilakukan melalui grup Whatsapp atau Facebook. Informasi pelatihan diinfokan dan dibahas melalui kedua media ini, dan kemudian dialog tersebut dilanjutkan pada saat pertemuan (misalnya pada saat ada pelatihan bagi guru-guru Bahasa Inggris). Keaktifan grup Whatsapp dan Facebook dalam berbagi informasi berdampak positif terhadap guru-guru Bahasa Inggris dan juga murid-muridnya. Para guru Bahasa Inggris dapat memperoleh informasi dan pelatihan di Brunei Darussalam dalam hal peningkatan mutu pengajaran *listening* (menyimak), *reading* (membaca), dan *speaking* (berbicara) dengan penutur asli bahasa Inggris dari Inggris. Hasil pembelajaran ini diterapkan pada para murid untuk latihan menjadi *master of ceremony* (MC), drama, dan membaca puisi dalam bahasa Inggris. Dampak berikutnya adalah mendatangkan kebanggaan orang tua murid-murid yang bersangkutan.

Beberapa tahun yang lalu sempat terdapat sumber pembiayaan kegiatan MGMP dari pemerintah, tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional, namun sekarang pembiayaan itu pun tidak berlanjut. Fenomena ini kemudian dikritik oleh beberapa pihak, dua di antaranya adalah media lokal dan pejabat di Dinas Pendidikan kabupaten yang menyayangkan rendahnya inisiatif guru untuk menggunakan tunjangan jabatannya untuk keperluan peningkatan kualitas mengajar mereka.

Kualitas guru sedikit banyak tergambar dari metode mereka mengajar di dalam kelas. Kemampuan guru yang rendah dalam penguasaan teknologi adalah hal yang banyak disoroti oleh para pemangku kepentingan. Menurut mereka, penguasaan teknologi merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh guru, terutama dalam menghadapi Kurikulum 2013. Pemakaian teknologi yang kurang tepat sasaran juga perlu dikritisi. Sebagaimana ditemukan di lapangan, salah satu sekolah menemui kesulitan dalam menggunakan (komputer) tablet yang dibagikan oleh Dinas Pendidikan karena tidak adanya jaringan sinyal di wilayahnya dan *liquid crystal display* (LCD) untuk menampilkan bahan ajar yang diakses melalui tablet tersebut. Beberapa pihak menilai bahwa metode ajar yang baik tidak melulu harus bergantung pada teknologi canggih. Pada akhirnya, kreativitas, sikap terbuka, dan konsentrasi guru dalam mengajar dianggap sebagai kunci dari metode mengajar yang baik.

Tingkat kesejahteraan guru yang belum memadai dianggap sebagai salah satu penyebab rendahnya konsentrasi guru dalam mengajar. Hal ini terutama dihadapi oleh GTT yang masih harus mencari sumber nafkah lain di luar pekerjaan mengajar untuk mencukupi kebutuhannya. Selain masalah kesejahteraan, persoalan yang dihadapi oleh guru adalah beban administrasi yang dianggap sangat memberatkan. Salah satunya adalah dalam hal pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari pemerintah daerah. Pada banyak kasus, beban administrasi untuk mempersiapkan pertanggungjawaban dana BOS menyita sebagian waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk menyiapkan bahan ajar. Padahal, dana BOS dan BOSDA yang diterima sering kali dianggap tidak sebanding dengan beban administrasi yang harus ditanggung. Hal ini terutama dihadapi oleh sekolah-sekolah di daerah yang jauh dari perkotaan yang jumlah muridnya terbatas.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumbawa merupakan perdesaan yang sebagian kecil di antaranya adalah daerah terisolasi. Dengan wilayah seperti itu, persoalan pendidikan terkait guru yang juga dianggap perlu segera diatasi adalah jumlah guru dan distribusi guru yang tidak merata. Persoalan ini dirasa cukup pelik melihat kenyataan bahwa pengangkatan guru masih dilakukan secara terpusat dan daerah juga tidak bisa mengangkat guru honorer, sementara jumlah guru yang memasuki usia pensiun makin bertambah. Selama ini, sekolah banyak mengandalkan GTT yang pembiayaannya diambil dari dana BOS. Lagi-lagi hal ini menjadi masalah tersendiri bagi sekolah yang dana BOS-nya terbatas. Pada banyak kasus, kami menemukan GTT yang dibayar seadanya.

Lampiran 2 merinci bagaimana permasalahan pendidikan di Kabupaten Sumbawa dapat diatasi. Saat ini, guru (termasuk MGMP, KKG, dan forum guru) sudah memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan UU. Namun, guru harus berkomitmen dan memiliki kreativitas dalam pembelajaran, disiplin hadir di kelas, dan mengikuti kegiatan-kegiatan forum guru secara berkelanjutan untuk memperbaiki dan memperkaya pengetahuan tentang mata pelajaran yang diampunya. MGMP/KKG yang belum semuanya aktif untuk semua mata pelajaran perlu diaktifkan, khususnya MGMP Matematika dan Bahasa Indonesia. MGMP Bahasa Inggris dapat dijadikan sebagai contoh untuk keaktifan bermusyawarah, baik melalui pertemuan, kelompok diskusi Whatsapp, pemasangan status dalam Facebook, atau media lainnya. Dengan media ini, proses pembelajaran dapat berlangsung “24 jam”, tidak hanya saat pembelajaran tatap muka.

Oleh karena itu, dukungan Dinas Diknas sangat diperlukan dalam upaya peningkatan mutu guru, antara lain, dengan pemerataan distribusi guru, mengadakan pelatihan bagi guru dengan pelatih yang berkualitas, mengayakan metode pembelajaran, dan membangun komunikasi yang intensif dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan. Saat ini terdapat grup Whatsapp “Bappeda” yang dapat menginspirasi pembentukan grup Whatsapp “Peduli Pendidikan” atau lainnya.

## 2.2 Dukungan Orang Tua

Rendahnya dukungan orang tua disebabkan oleh kurangnya kemampuan orang tua dalam membimbing anak-anaknya dan kecenderungan orang tua untuk menyerahkan pembelajaran sepenuhnya kepada sekolah. Persoalan ini terkait dengan latar pendidikan orang tua murid yang rendah dan faktor ekonomi keluarga, terutama keluarga petani dan pedagang. Orang tua memiliki peran yang penting karena anak menghabiskan sebagian besar waktunya di luar jam sekolah. Akan tetapi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua membuat kemampuan mereka dalam membimbing pembelajaran anak di rumah terbatas. Motivasi orang tua dan pandangan mereka yang belum melihat pentingnya pendidikan anak juga masih menjadi masalah di sebagian kelompok masyarakat, terutama mereka yang terdesak secara ekonomi dan terisolasi dari informasi luar. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa komunikasi yang terjalin antara orang tua dan pihak sekolah belum seluruhnya berjalan dengan baik. Pada banyak kesempatan, sikap orang tua yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada sekolah menjadi keluhan yang dilontarkan oleh para informan yang berasal dari kelompok pendidik, sementara rendahnya pelibatan orang tua dalam urusan sekolah, seperti pelibatan mereka dalam komite sekolah, menjadi hal yang banyak dikeluhkan oleh para orang tua murid. Orang tua merasa lebih banyak dilibatkan ketika ada keperluan yang bersifat material saja, seperti pada saat pengumpulan biaya pembangunan sekolah.

## 2.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Permasalahan terbesar terkait faktor sarana dan prasarana mencakup ketersediaan buku pelajaran, kondisi fisik sekolah/kelas, dan teknologi informasi. Terkait dengan ketersediaan buku, berbagai pihak mengeluhkan kurangnya distribusi buku dalam menghadapi perubahan kurikulum. Salah satu penyebab masalah ini adalah terbatasnya jumlah pemasok buku pelajaran yang ada di daerah ini. Terkait dengan fisik sekolah, hal yang dikeluhkan adalah tidak seimbangnya antara jumlah ruang kelas dan jumlah rombongan belajar pada beberapa sekolah, termasuk yang berada di dalam kota. Kalaupun ada sekolah dengan jumlah ruang kelas dan rombongan belajar yang seimbang, warga sekolah kurang bisa merawat fasilitas yang ada. Perilaku tersebut juga menjadi penyebab tidak bisa digunakannya alat-alat peraga yang didistribusikan kepada sekolah. Selain itu, penguasaan keterampilan menggunakan alat peraga di kalangan guru dianggap masih kurang, seperti halnya penguasaan mereka atas keterampilan teknologi informasi. Hal-hal lain yang juga menjadi penyebab adalah sedikitnya pelatihan dan tidak terjangkaunya wilayah sekolah oleh jaringan internet.

Bupati Sumbawa terpilih baru sekitar dua bulan (sebelum studi ini dilakukan) membawa perubahan di bidang pendidikan, termasuk pendidikan dasar. Walaupun pergantian pejabat belum terjadi, beberapa sekolah yang sebelumnya dirangkap oleh kepala sekolah lain kini mulai diisi oleh kepala sekolah yang baru. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai bahwa keberadaan kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap guru yang akhirnya juga akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran murid. Permendiknas No. 13 Tahun 2007 mengatur standar kepala sekolah/madrasah mengenai kualifikasi/dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Perubahan ini diharapkan membawa perbaikan terhadap hasil pembelajaran.

### III. ANALISIS INOVASI DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN

Di Kabupaten Sumbawa, inovasi pendidikan dasar dilakukan dengan mereplikasi inovasi pusat dan inovasi khusus dari daerah. Inovasi pendidikan dasar yang mereplikasi inovasi pusat adalah BOSDA, peningkatan kapasitas MGMP/KKG, Jurnal Pendidikan SAMAWA, insentif guru di daerah terpencil, dan Jurnal Cendekia, sedangkan inovasi yang berasal dari daerah adalah Forum Ilmiah Guru (FIG), Sekolah Komunitas, insentif guru madrasah, dan komite sekolah per dusun.

BOSDA merupakan replikasi dari program BOS. Program ini digagas dan dilaksanakan oleh Dinas Diknas dengan menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa. Program ini dimulai pada 2009 hingga sekarang dengan cakupan seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Sumbawa.

Jurnal Cendekia merupakan modifikasi dari Program BERMUTU pada 2011–2012 yang dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Sumbawa dan digagas oleh Dinas Diknas. Setelah vakum selama beberapa tahun, Jurnal Cendekia kembali terbit pada 2015 atas gagasan bersama FIG dan Dinas Diknas. Sementara itu, Jurnal Pendidikan SAMAWA terbit perdana pada Maret 2016 dan saat ini sedang persiapan penerbitan yang kedua.

Peningkatan kapasitas MGMP/KKG digagas oleh Dinas Diknas pada 2008. Kebijakan ini mencakup MGMP mata pelajaran yang bertujuan berbagi pengalaman guru dan memperkaya pengetahuan guru-guru yang tergabung dalam MGMP. Sementara itu, insentif untuk guru di daerah terpencil dilaksanakan sejak 2010 hingga saat ini dan merupakan hasil diskusi dari berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Inovasi daerah dibedakan menjadi inovasi bagi guru, inovasi bagi murid, dan inovasi bagi orang tua murid. Inovasi bagi guru berupa FIG dan insentif guru madrasah. FIG merupakan forum yang dibentuk Dinas Diknas sebagai wadah bagi guru-guru di Kabupaten Sumbawa untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan kemampuan menulis. Sementara itu, insentif untuk guru madrasah merupakan gagasan bersama Dinas Diknas dan Kementerian Agama pada 2010 untuk memberikan bantuan bagi guru-guru honorer di madrasah.

Sekolah Komunitas merupakan inovasi daerah bagi joki anak-anak dalam hal bersikap dan membantu mereka untuk meningkatkan minat belajar, sedangkan inovasi komite sekolah per dusun merupakan gagasan di tingkat sekolah agar para pengurus dan anggota komite memastikan bahwa proses belajar mengajar anak didik di tiap dusun berjalan dengan baik dan ditaati anak didik.

Dari penerapan berbagai inovasi tersebut, dapat dipetik pelajaran bahwa hasil pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh satu inovasi saja. Inovasi-inovasi tersebut bersinergi untuk meningkatkan hasil pembelajaran murid. Di sisi guru, dengan adanya FIG, Jurnal Cendekia dan Jurnal Pendidikan SAMAWA, dan insentif untuk guru madrasah, kualitas guru dalam mendidik dan mengajar siswa dan kesejahteraan mereka dapat meningkat. Hal ini pada akhirnya dimaksudkan agar proses belajar mengajar makin baik sehingga diharapkan hasil pembelajaran murid juga meningkat.

Di sisi lain, murid juga diberi motivasi, dan dirangsang minat dan semangat belajarnya melalui Sekolah Komunitas dan keaktifan komite sekolah dalam memantau kelompok belajar murid di masing-masing dusun. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas murid, baik dalam hal budi pekerti maupun pemahaman tentang mata pelajaran.

Ke depannya, sinkronisasi sekolah dan orang tua/masyarakat dan murid menjadi sangat penting guna meningkatkan pembelajaran di Kabupaten Sumbawa. Di sisi sekolah, diperlukan kepala sekolah yang dapat mengemban dan menerapkan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, baik yang menyangkut aspek kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, maupun aspek sosial.

Pengalaman Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa penerapan Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah sebaiknya dihindari atau diminimalisasi. Keberadaan kepala sekolah yang baik akan menghasilkan guru yang baik pula, dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, guru juga menjadi faktor yang sangat penting dalam pembelajaran. Guru tidak hanya harus pintar, tetapi juga harus 'dekat' dengan murid. Dekat dalam hal ini berarti menyenangkan dalam menyampaikan materi ajarnya; menggunakan alat bantu/peraga, seperti penggunaan LCD dan bentuk-bentuk kubus, trapesium dan sebagainya; serta tegas tetapi tidak galak. Khususnya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, cara mengajar yang baik adalah guru memberikan materi pelajaran, guru memberikan soal untuk didiskusikan dalam kelompok, dan salah satu murid wakil kelompok mempresentasikan/menjelaskan secara bergantian.

Selain itu, keberadaan Jurnal Cendekia dan Jurnal Pendidikan SAMAWA memotivasi para guru mata pelajaran untuk menulis lebih banyak dan mendalami mata pelajaran yang mereka ajar. Hal ini akan meningkatkan minat baca guru dan meningkatkan angka kredit mereka.

Di sisi murid, diperlukan dukungan orang tua dan sekolah. Perlengkapan sekolah harus dipenuhi orang tua atau sekolah melalui dana BOS. Pemberian motivasi, dan perangsangan minat dan semangat belajar murid harus didukung, termasuk pengadaan kegiatan belajar kelompok dan pelajaran tambahan.

Peran komite sekolah di setiap dusun untuk memastikan berjalannya proses belajar kelompok murid-murid di dusun sangat membantu dalam meningkatkan motivasi, minat, dan semangat belajar para murid.

Di luar ketiga elemen penting pembelajaran tersebut, terdapat faktor-faktor eksternal yang diperlukan untuk mendukung sekolah dalam pembelajaran seperti kebijakan, pengadaan buku, dan program-program inovasi lainnya. Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang diperlukan untuk mendukung orang tua murid/komite sekolah adalah upaya pengurangan keterlibatan anak dalam mencari nafkah (melalui program peningkatan kesejahteraan keluarga atau lainnya), kebijakan penguatan peran komite sekolah, atau faktor eksternal lainnya.

## IV. PEMETAAN KEPENTINGAN, PENGARUH, DAN HUBUNGAN ANTARPEMANGKU KEPENTINGAN

### 4.1 Potensi untuk Berkontribusi terhadap Hasil Pembelajaran

Berdasarkan identifikasi pemangku kepentingan di bidang pendidikan dasar di Kabupaten Sumbawa, diperoleh data adanya 19 pemangku kepentingan yang memiliki ketertarikan dan pengaruh terhadap hasil pembelajaran murid. Pemangku kepentingan tersebut adalah bupati, Dinas Diknas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pengawas sekolah, guru, orang tua murid, PGRI, UPTD, PT, Dewan Pendidikan, organisasi nonpemerintah (ornop), organisasi masyarakat (ormas), camat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengusaha, komite sekolah, media lokal, dan kepala desa. Secara umum, para pemangku kepentingan berpendapat bahwa dari sepuluh kabupaten/kota yang ada di NTB, Kabupaten Sumbawa berada di tengah-tengah<sup>1</sup> dalam hal hasil pembelajaran.

Bagan pada Lampiran 1 menunjukkan bahwa seluruh pemangku kepentingan tersebut memiliki ketertarikan dari rendah hingga tinggi dan pengaruh dari rendah hingga tinggi. Pada kuadran ketertarikan tinggi-pengaruh tinggi, terdapat tujuh pemangku kepentingan, dan enam di antaranya diwawancarai dalam studi ini. Bupati tidak diwawancarai, tetapi tokoh ini memiliki pengaruh tinggi karena visi, misi, dan kebijakannya yang dijabarkan dan memengaruhi pembelajaran. Bappeda dan DPRD juga memiliki pengaruh tinggi, tetapi ketiganya tidak memiliki intervensi langsung terhadap hasil dan proses pembelajaran.

Guru (beserta sekolah dan kepala sekolah) menjadi penyebab utama rendahnya hasil pembelajaran. Masalah jumlah, distribusi, dan kualitas guru menjadi sorotan berbagai pemangku kepentingan lain akan rendahnya hasil pembelajaran di Sumbawa. Oleh karena itu, guru berpotensi besar untuk memperbaiki pembelajaran siswa.

Faktor *guru* tidak berdiri sendiri. Di Sumbawa terdapat Dinas Diknas dan pengawas sekolah yang langsung mengawasi dan membina guru-guru di wilayahnya. Dinas Diknas, khususnya seksi kurikulum dan bagian Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), berkaitan langsung dengan peningkatan mutu guru. Hal yang telah dilakukan adalah, antara lain, inovasi penerbitan jurnal untuk mengembangkan minat menulis guru-guru mata pelajaran, pelatihan kurikulum, dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan mutu guru.

### 4.2 Kemauan Pemangku Kepentingan untuk Terlibat dalam Peningkatan Hasil Pembelajaran

Seluruh pemangku kepentingan ingin terlibat dalam peningkatan hasil pembelajaran. Kepala sekolah dan guru memiliki keterlibatan langsung dan pengaruh nyata dalam peningkatan pembelajaran.

---

<sup>1</sup>Seluruh pemangku kepentingan berpendapat demikian, tetapi mereka tidak menyebutkan secara pasti urutan berapa, hanya kira-kira urutan kelima atau keenam. Mereka juga tidak berani menyebutkan kabupaten mana yang berada di atas atau di bawah Sumbawa.

### 4.3 Pengaruh Aktual Pemangku Kepentingan dalam Pembelajaran

Pengaruh aktual pemangku kepentingan dapat dilihat pada Lampiran 1 di bawah. Guru menjadi faktor utama dalam peningkatan hasil pembelajaran. Kepala sekolah yang menjadi pengelola berpengaruh penting dalam berjalannya proses dan sistem belajar-mengajar di tingkat sekolah.

### 4.4 Pentingnya Pemangku Kepentingan Dilibatkan dalam Proses Peningkatan Hasil Pembelajaran

Pemangku kepentingan yang penting dilibatkan dalam proses peningkatan pembelajaran adalah guru, Dinas Diknas, orang tua murid, komite sekolah, dan Dewan Pendidikan. Guru terlibat langsung dalam peningkatan hasil pembelajaran. Orang tua berperan sebagai pendorong murid, tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan belajar siswa di sekolah. Dinas Diknas berperan langsung dalam peningkatan mutu guru, sekaligus pengawasan terhadap guru dan sekolah. Peran komite sekolah, yang selama ini bervariasi antarsekolah, sudah saatnya ditingkatkan demi peningkatan hasil pembelajaran. Komite sekolah yang berhasil dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan model untuk peningkatan pembelajaran. Dewan Pendidikan lebih diintensifkan untuk melakukan pemantauan dan pemberian usulan perbaikan atas pelaksanaan pembelajaran.

Selain itu, Bappeda, bupati, DPRD (khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan) yang sangat berperan dalam penyusunan kebijakan pendidikan, serta ornop yang bergerak di bidang pendidikan perlu dilibatkan dalam peningkatan pembelajaran.

### 4.5 Kemauan Politik sebagai Akar Permasalahan: Anggaran dan Kebijakan

Pembahasan mengenai masalah-masalah yang memengaruhi rendahnya hasil pembelajaran murid pendidikan dasar pada akhirnya bermuara pada keterbatasan anggaran dan ketiadaan kebijakan yang mendukung upaya tersebut. Kemauan politik kepala daerah dan pihak-pihak terkait pada akhirnya menjadi penentu arah dan kesuksesan upaya peningkatan hasil pembelajaran murid. Pemetaan yang kami lakukan memperlihatkan bahwa guru menjadi aktor utama dalam upaya tersebut karena gurulah yang bersentuhan langsung dengan murid dan juga orang tuanya. Namun, guru membutuhkan dukungan berbagai pihak yang berada di atasnya, mulai dari kepala sekolah, pengawas, Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, hingga Kementerian Pendidikan di tingkat pusat. Program dan kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Pusat pada dasarnya sama untuk semua daerah di Indonesia. Akan tetapi, capaian hasil pembelajaran juga sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah daerah. Satu hal menarik yang kami tangkap selama penelitian ini adalah kenyataan bahwa guru memiliki kekuatan politik yang cukup besar di daerah ini. Seperti disampaikan salah seorang pejabat setempat, dua pertiga aparat daerah adalah tenaga guru dan tenaga pendidik yang tentu memiliki sanak saudara. Dari masa ke masa, pimpinan daerah menyampaikan visi dan misi mereka terkait pendidikan. Terlepas dari segala capaian yang diraih, masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Bupati terdahulu dengan slogannya “Samawa Mampis Rungan” menorehkan banyak prestasi di bidang pendidikan. Sampai akhir masa jabatannya, Sumbawa termasuk daerah berprestasi hingga mendapatkan dana sebesar 500 miliar rupiah, tetapi sampai sekarang tidak jelas dana tersebut digunakan untuk apa. Harapan besar tertumpu pada bupati yang baru saja terpilih yang mengusung slogan “Sumbawa Hebat dan Bermartabat”. Bupati terpilih ini percaya bahwa tujuan slogan ini akan dicapai melalui pendidikan.

**Tabel 1. Analisis Penyelesaian Masalah**

Lembaga Berwenang	Dukungan yang Diperlukan	Kapabilitas	
		Hal yang Tersedia	Hal yang Dibutuhkan
Guru (termasuk pengawas, MGMP KKG, Forum Guru)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbarui metode dan kreativitas pengajaran</li> <li>Kedisiplinan dan kehadiran di kelas</li> <li>Kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu</li> <li>Kontinuitas dan frekuensi pertemuan semua jenis forum guru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guru yang sesuai kualifikasi sudah tersedia</li> <li>Tunjangan sertifikasi ada, mestinya guru sudah makin profesional</li> <li>Latar belakang perguruan tinggi dan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang beragam</li> <li>MGMP/KKG sudah ada, tetapi belum melakukan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen</li> <li>Kreativitas guru dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada</li> <li>Pendidikan karakter bagi guru</li> <li>Interaksi yang menyenangkan antara guru dan murid</li> <li>Pengaturan jadwal yang tidak mengganggu waktu belajar</li> <li>Kontinuitas</li> <li>Wadah dan hasil, misalnya jurnal</li> </ul>
Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data guru (jumlah, distribusi, kualifikasi, status kepegawaian)</li> <li>Pemerataan guru</li> <li>Pelatihan (jenis pelatihan yang bervariasi, SDM pelatih harus bagus, jumlah pelatihan)</li> <li>Peningkatan kualifikasi guru</li> <li>Peningkatan status GTT</li> <li>Metode pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distribusi guru terkonsentrasi di kota</li> <li>Insentif guru di daerah terpencil</li> <li>Pelatihan ada, tetapi terbatas</li> <li>Rasio pengawas sekolah dan sekolah rendah karena lokasi sekolah tersebar dan sulit diakses</li> <li>Metode pengajaran masih monoton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi antarbidang dan antarseksi yang terkait dengan pembelajaran</li> <li>Meningkatkan kesempatan SDM lokal</li> <li>Pelatih berkualitas dari luar Sumbawa</li> <li>Komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>
Komite sekolah	Dorongan dan bimbingan orang tua terhadap siswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkoordinasi orang tua siswa</li> <li>Mediator antara sekolah dan orang tua siswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keaktifan komite</li> <li>Koordinasi dengan komunikasi yang lebih intens</li> </ul>
DPRD	Advokasi terkait alokasi anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Advokasi masih terbatas</li> <li>Fungsi penganggaran</li> <li>Fungsi pengawasan eksekutif</li> <li>Hak inisiatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Advokasi menyeluruh</li> <li>Komitmen</li> <li>Peraturan-peraturan terkait pendidikan</li> </ul>

Lembaga Berwenang	Dukungan yang Diperlukan	Kapasitas	
		Hal yang Tersedia	Hal yang Dibutuhkan
Bupati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan dan komitmen politik</li> <li>Koordinasi lintas sektoral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan menjadi prioritas pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)</li> <li>Kewenangan penuh bupati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi</li> <li>Penyerderhanaan komunikasi karena selama ini terlalu banyak yang terlibat</li> </ul>
Kemendikbud	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan kesiapan untuk menerapkan kurikulum baru</li> <li>Bahan penunjang pembelajaran (buku, bahan ajar)</li> <li>Sosialisasi kebijakan</li> <li>Dukungan anggaran (BOS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah dimulai, tetapi belum mencukupi (pelatihan, buku, bahan ajar, sosialisasi)</li> <li>Dana dampungan dari BOSDA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu pelatih profesional</li> <li>Materi yang mudah bagi pengguna (<i>user-friendly</i>)</li> <li>Koordinasi antarsektor</li> <li>Jumlah dana yang lebih besar</li> <li>Administrasi yang lebih sederhana</li> </ul>

**Tabel 2. Inovasi di Bidang Pendidikan Dasar**

No.	Nama Kebijakan/ Inovasi	Sumber Kebijakan/ Inovasi	Sifat	Periode Pelaksanaan	Penggagas	Pelaksana	Cakupan	Dampak/Capaian
1	BOSDA	APBD Sumbawa	Menjadi komplemen program pusat	2009–sekarang	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Semua SD dan SMP se-Kabupaten Sumbawa	Dananya kecil, hanya untuk membeli alat tulis kantor
2	Peningkatan Kapasitas MGMP/KKG	Dinas Pendidikan dan swadaya guru (ada uang transpor dari BOS)	Awalnya replikasi program pusat, sekarang pengaktifan kembali	2008–sekarang	Bidang PMPTK Dinas Pendidikan	Guru mata pelajaran	Guru mata pelajaran	Berbagi pengalaman antarguru mata pelajaran, memperkaya pengetahuan, termasuk dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
3	<i>Jurnal Pendidikan Samawa</i>	Dinas Pendidikan dan FIG	Awalnya replikasi program BERMUTU, sekarang dilanjutkan oleh Kasi Kurikulum Bidang Dikdas	Periode pertama 2011–2012; awalnya bernama <i>Jurnal Cendekia</i> , sekarang menjadi <i>Jurnal Pendidikan Samawa</i>	<i>Jurnal Cendekia</i> : ada pengelola lintas seksi; sekretariatnya di Subbagian Program  <i>Jurnal Pendidikan Samawa</i> di Seksi Kurikulum dengan mengundang pengulas dari luar Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan FIG	Semua guru	Guru menjadi lebih bersemangat dalam menulis; bisa menjadi angka kredit untuk kenaikan pangkat guru
4	FIG	Swadaya guru	Inovasi	2015–sekarang	Dinas Pendidikan dan FIG	Dinas Pendidikan dan FIG	Semua guru	Berbagi pengalaman guru, khususnya dalam meningkatkan kemampuan menulis
5	Sekolah Komunitas	Lembaga Psikologi Pelangi Harapan (LPPH)	Inovasi	2013–sekarang	Dosen-dosen di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)	LPPH, UTS, sukarelawan	Joki anak-anak	(1) Menjangkau para joki anak-anak pada saat perlombaan; (2) Ada perubahan perilaku (menjadi lebih baik); (3) Muncul minat belajar

No.	Nama Kebijakan/ Inovasi	Sumber Kebijakan/ Inovasi	Sifat	Periode Pelaksanaan	Penggagas	Pelaksana	Cakupan	Dampak/Capaian
6	Insentif Guru di Daerah Terpencil	APBD Sumbawa	Replikasi program pusat	Sebelum 2010–sekarang	Diskusi para pemangku kepentingan pendidikan di Sumbawa	Dinas Pendidikan	Guru di daerah terpencil yang kriterianya ditentukan pemerintah daerah	Ada peningkatan minat guru untuk mengajar di daerah terpencil
7	Insentif Guru Madrasah	APBD Sumbawa	Inovasi	Sebelum 2010–sekarang	Diskusi para pemangku kepentingan pendidikan di Sumbawa	Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama	Guru honorer madrasah (MI, MTs, MA)	Membantu meningkatkan kesejahteraan para guru honorer madrasah
8	Komite Sekolah per dusun	Komite Sekolah SMP A	Inovasi lokal sekolah	Sudah berjalan lama sampai sekarang	Komite dan pihak sekolah	Komite sekolah	Sekolah	Persoalan sekolah di masing-masing dusun diselesaikan oleh pengurus komite di dusun tersebut
9	<i>Jurnal Cendekia</i> (lihat juga inovasi No. 3)	APBD Sumbawa	Replikasi program BERMUTU	2011–2012	Dinas Pendidikan dengan melibatkan lintas seksi, sebagai koordinator Bidang PMPTK	Ada pengelola yang berkantor di Subbagian Program	Semua guru	(1) Guru menjadi lebih bersemangat dalam menulis; (2) bisa menjadi angka kredit untuk kenaikan pangkat guru

## LAMPIRAN

# LAMPIRAN 1

## Ringkasan Sepuluh Isu Teratas

Sepuluh isu teratas dibahas berdasarkan kelompok, yaitu kelompok pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pendukung kebijakan.

### A. Kelompok Pembuat Kebijakan

Isu-isu teratas dari kelompok pembuat kebijakan dirangkum dari hasil wawancara mendalam dengan Dinas Diknas, Bappeda, DPRD Komisi Pendidikan, dan Asisten Pemerintahan Daerah. Kesepuluh isu teratas tersebut adalah:

1. Guru (rasio guru, kualitas, potensi menjadi guru, distribusi, rotasi, perilaku dan mutu, paradigma serta permasalahan guru lainnya). Isu guru banyak muncul dalam wawancara dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Sumbawa terkait rendahnya hasil pembelajaran murid di tingkat pendidikan dasar. Banyak alasan yang dikemukakan narasumber terkait dengan guru. Dinas Diknas paling banyak menyoroti isu guru terkait dengan belum adanya kesesuaian rasio guru dan murid; terbatasnya potensi masyarakat di daerah terpencil untuk menjadi guru; masalah distribusi guru, termasuk guru mata pelajaran; masalah guru yang sudah merasa pada zona nyaman sehingga perilaku dan mutu guru stagnan; dan perpindahan dan rotasi guru yang sangat minim. Selain itu, Dinas Diknas menilai bahwa guru hanya mengejar kompensasi dan sertifikasi sehingga kegiatan mengajar mereka di sekolah kurang maksimal, sedangkan Bappeda menilai bahwa distribusi guru PNS di daerah terpencil terkendala rombongan belajar yang masih kurang. Oleh karena itu, Dinas Diknas menyarankan adanya penguatan kelompok kerja guru (KKG) sebagai salah satu upaya peningkatan mutu guru yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan mutu pembelajaran. Bappeda juga menilai bahwa di satu sisi, tuntutan guru yang berkualitas sangat tinggi, tetapi di sisi lain, jumlah guru bidang studi dan guru PNS masih kurang.  
Untuk menjamin kualitas pendidikan dasar, ada juga kendala faktor pengawasan. Asisten pemerintahan setda menilai bahwa di Kabupaten Sumbawa pengawasan dan evaluasi masih kurang karena jumlah pengawas yang masih kurang. Selain itu, untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, seperti Kecamatan Batu Lante yang berada di pegunungan, hanya ada dua pengawas yang bertugas mengawasi sepuluh sekolah yang ada di kecamatan tersebut.
2. Guru bidang studi masih kurang. Selain masalah distribusi guru, Kabupaten Sumbawa masih mengalami kekurangan guru bidang studi. Dinas Diknas menilai bahwa kekurangan pada distribusi guru bidang studi merupakan contoh adanya kelebihan jumlah guru bidang studi tertentu, seperti Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan kekurangan guru bidang studi tertentu, seperti Bimbingan dan Konseling (BK) dan Matematika. Kekurangan atau ketidakmerataan distribusi guru bidang studi berdampak pada guru yang terpaksa tidak bisa mendapat sertifikat kelulusan sertifikasi guru karena jam mengajarnya kurang.
3. Kompetensi dan kualifikasi. Kekurangan dan ketidakmerataan guru PNS selama ini disebabkan oleh guru yang menumpuk di wilayah perkotaan. Kekurangan guru PNS ini ditangani dengan mengangkat guru honor yang tidak terikat dan standar kualitasnya tidak jelas sehingga mempengaruhi kualitas pembelajaran. Kualitas guru dipengaruhi oleh kebijakan yang mewajibkan guru memiliki latar belakang pendidikan minimal S-1. Terdapat banyak guru yang sudah berumur (tua) tetapi belum memenuhi kualifikasi tersebut. Kompetensi dan kualifikasi guru selama ini masih kurang sehingga perlu adanya peningkatan melalui berbagai pelatihan.

Setda menilai bahwa pelatihan bagi guru memerlukan biaya yang besar, sementara anggaran pendidikan masih banyak digunakan untuk pengeluaran rutin.

4. Sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dasar masih kurang, terutama sarana alat peraga. Tidak hanya terbatas pada kekurangan alat peraga, penguasaan teknologi oleh guru-guru juga masih terbatas. Hal ini terjadi karena pola belajar di sekolah masih terbatas pada penggunaan buku dan belum memanfaatkan media lain. Meskipun demikian, Dinas Diknas menilai bahwa media pembelajaran bukan merupakan masalah yang utama; gurulah masalah utamanya. Media pembelajaran adalah alat pendukung. Bappeda juga menilai bahwa sarana dan prasarana pendidikan untuk tingkat sekolah dasar sudah tersedia di setiap desa yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Anggota DPRD juga menyoroti kurangnya sarana dan prasarana ini. Walaupun sudah ada gedung sekolah, sarana penunjang pembelajaran, seperti media belajar, masih kurang. Teknologi selama ini sudah digunakan untuk ujian di sekolah, tetapi pembelajaran tidak menggunakan audiovisual.

5. KKG kurang. Kualitas guru yang kurang juga disebabkan oleh adanya KKG yang tidak atau kurang aktif. Kelompok ini sebenarnya bisa digunakan sebagai wadah untuk berbagi pengalaman antarguru, baik guru mata pelajaran maupun guru kelas, sehingga akan memperkaya pengalaman dan pengetahuan guru-guru.

Pelatihan bagi guru dapat juga diadakan melalui KKG. Upaya mengaktifkan kegiatan kelompok guru dapat dilakukan melalui sekolah; misalnya, sekolah inti dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan guru. Guru-guru rayon dapat melakukan pertemuan di tempat tersebut. Upaya lain dapat dilakukan melalui aktivitas dalam KKG (untuk tingkat sekolah dasar) atau musyawarah kerja mata pelajaran (untuk sekolah menengah) sehingga kegiatan KKG dapat berjalan secara berkelanjutan.

Beberapa tahun yang lalu pernah terdapat proyek untuk membuat kelompok-kelompok guru ini aktif, tetapi kegiatan tersebut kurang maksimal. Setda menilai bahwa guru harus dipaksa, misalnya melalui peraturan bupati, agar guru lebih banyak bersosialisasi dengan guru-guru lain dan tidak individualis.

6. Persoalan anak bekerja. Bappeda menyebutkan bahwa masih ditemukan anak-anak sekolah yang bekerja untuk membantu menambah penghasilan orang tua mereka. Selain itu, Bappeda dan setda menilai bahwa orang tua kurang mendukung pendidikan anak mereka. Bahkan, ditemukan bahwa 30 anak yang menjadi joki terkesan dieksploitasi oleh pemilik kuda. Umumnya, joki anak-anak ini berasal dari keluarga miskin dan masih bersekolah di kelas 1 hingga kelas 3 sekolah dasar. Anak-anak tersebut menjadi joki atas dasar kontrak antara orang tua mereka dan pemilik kuda. Dampak kegiatan ini bagi anak adalah bahwa anak tidak bisa bersekolah selama beberapa hari ketika ada balapan. Hal ini terjadi selama bertahun-tahun dan tidak ada perhatian diberikan oleh pihak sekolah. Dampak lanjutannya adalah bahwa anak yang menjadi joki tertinggal pelajarannya di sekolah. Ketertinggalan pelajaran ini berpengaruh terhadap kemampuan literasi anak. Hal ini diperparah dengan kurangnya perhatian orang tua, kualitas guru, dan metode mengajar.

7. Dimanjakan oleh teknologi. Murid-murid saat ini dimanjakan dengan adanya penemuan-penemuan teknologi baru. Murid-murid di tingkat pendidikan dasar kurang memahami mekanisme pembelajaran, khususnya terkait logika perhitungan. Dengan adanya alat hitung elektronik, murid dapat dengan mudah menghitung perkalian, pembagian, penambahan, ataupun pengurangan bilangan. Dengan demikian, murid menjadi tergantung pada teknologi tersebut.

Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa mengkhawatirkan murid yang bergantung pada dan dimanjakan teknologi ini. Hal ini berlangsung terus tanpa ada peringatan dari guru ataupun

pelajaran cara berhitung yang baik dan menggunakan logika. Guru lebih banyak menjalankan rutinitas kerja sehari-hari saja dan kurang memotivasi murid. Bahkan, pemangku kepentingan di bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa belum menjadikan peningkatan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Ditambah lagi, anggota DPRD ini menilai bahwa mereka mengalami kesulitan untuk menyatukan pandangan DPRD dan pemerintah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika literasi dan numerasi murid di Kabupaten Sumbawa berada di kisaran rata-rata kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB.

8. Dukungan orang tua. Hasil pembelajaran juga dipengaruhi oleh kurangnya dukungan orang tua. Setda menilai bahwa literasi dipengaruhi kualitas guru, metode mengajar, dan perhatian orang tua. Dukungan orang tua masih sangat minim, bahkan terkadang murid diminta untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Setda setuju dengan hasil penelitian pada 2014 yang menunjukkan adanya kesenjangan antara desa dan kota. Di desa, kualitas guru relatif rendah dan perhatian orang tua juga kurang karena kesibukan mengurus lahan pertaniannya. Budaya belajar juga masih rendah dan pendidikan anak hanya diserahkan kepada guru.
9. Terbatasnya program. Bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah memiliki visi dan misi, dan program yang dituangkan dalam RPJMD. Rencana program ini diimplementasikan oleh semua pemangku kepentingan; salah satunya adalah Dinas Pendidikan yang menjalankan program bidang pendidikan. Koordinasi antara bupati, setda, Bappeda, Dinas Pendidikan, dan SKPD lain sangat baik. Rencana program pendidikan sudah disusun dan program tersebut merupakan program prioritas yang dituangkan dalam RPJMD. Anggota DPRD menilai bahwa program pendidikan sering kali tidak sinkron dalam pelaksanaannya; misalnya, ada program pembangunan perpustakaan, tetapi perpustakaan tersebut tidak dilengkapi dengan buku-buku. Anggota DPRD menambahkan bahwa pemangku kepentingan belum berkomitmen untuk menjadikan peningkatan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Anggaran pendidikan di Sumbawa mencapai 30%, tetapi anggaran tersebut dialokasikan untuk gaji, infrastruktur, dan kepentingan yang tidak langsung menyasar peningkatan SDM. Idealnya, anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk peningkatan SDM. Kurangnya program-program ini berakibat pada kurangnya hasil pembelajaran murid-murid.
10. Tidak ada pembedaan murid berdasarkan kekhususan kebutuhan dan gender. Dinas Diknas menilai bahwa murid-murid berkebutuhan khusus tidak dibedakan dengan murid-murid lain. Tidak ada juga pembedaan murid menurut gender dalam pembelajaran. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mengejar pendidikan.

## **B. Kelompok Pelaksana Kebijakan**

Isu-isu teratas dari kelompok pelaksana kebijakan dirangkum dari hasil wawancara mendalam dengan UPTD kecamatan, dua pengawas SD, dua pengawas SMP, dua kepala sekolah SD sampel, dua kepala sekolah SMP sampel, empat kelompok guru (dua SD dan dua SMP), dan satu pembina yayasan pendidikan Nahdlatul Wathan. Berikut ini pembahasan sepuluh isu teratas.

1. Kondisi pendidikan dasar di Kabupaten Sumbawa berada di kelompok menengah. Secara umum, para pemangku kepentingan menilai bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Sumbawa berada pada kisaran menengah. Menurut pengawas, kondisi pendidikan dasar di dua kecamatan yang disurvei tidak tertinggal dibandingkan kecamatan lain. Nahdlatul Wathan menyatakan bahwa sekolah di Kabupaten Sumbawa pada umumnya adalah sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta sangat sedikit (tanpa merinci berapa banyak untuk keduanya).

2. Pelatihan bagi guru kurang. Pemangku kepentingan berpendapat bahwa pelatihan bagi guru masih kurang. Hal ini menjadi salah satu penyebab masih rendahnya hasil pembelajaran. Guru merupakan pilar kemajuan pembelajaran murid. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kapabilitas guru menjadi sangat penting. Pengawas sekolah mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara guru yang mengikuti MGPM dan guru yang tidak mengikutinya. Guru yang ikut MGMP memiliki lebih banyak wawasan sehingga bisa bertukar pikiran dengan guru-guru dalam kelompoknya.
3. Kekurangan murid di perdesaan. Selain tidak meratanya distribusi guru di desa dan kota, populasi murid di perdesaan jauh berbeda dengan populasi murid di perkotaan. Menurut aparat UPTD, sekolah-sekolah di Kabupaten Sumbawa yang berada di perdesaan masih kekurangan murid dan guru.
4. Distribusi guru tidak merata. Kondisi pendidikan di Kabupaten Sumbawa mengalami kendala distribusi guru yang tidak merata. Masih banyaknya guru di wilayah perkotaan, utamanya guru PNS, akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran di perdesaan dan perkotaan. Kedua wilayah ini akan mengalami perbedaan hasil pembelajaran. Selain tidak merata distribusinya, guru yang ada pun masih menghadapi terbatasnya pelatihan untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Pengawas sekolah menilai bahwa pelatihan guru masih kurang karena kemampuan guru yang belum maksimal.
5. Perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang terjadi telah menimbulkan permasalahan dalam proses pembelajaran. Perubahan kurikulum berakibat pada perubahan, antara lain, dalam pengadaan buku pelajaran. Buku pelajaran yang sudah dipersiapkan ditarik kembali dan mengalami beberapa perubahan. Permasalahan buku dan sarana, menurut kepala UPTD Lopok, tidak terlepas dari ketidakpastian sistem pembelajaran nasional, seperti kerap bergantinya kurikulum. Beberapa tahun lalu setelah dikeluarkannya peraturan tentang Kurikulum 2013, kurikulum tersebut diujicobakan pada beberapa sekolah tetapi tidak berlanjut dan akhirnya diubah kembali ke kurikulum lama, yakni KTSP. Sejak diujicobakan pertama kali hingga saat ini, buku penunjang Kurikulum 2013 belum juga lengkap.

Buku merupakan hal yang sangat penting. Menurut Nahdlatul Wathan, pembelajaran sangat bergantung pada buku pelajaran dari pemerintah. Oleh karena itu, perubahan kurikulum sudah seyogianya memikirkan ketersediaan buku yang akan digunakan sesuai dengan kurikulum tersebut. Para kepala sekolah sangat bergantung pada dana BOS untuk pengadaan buku pelajaran. Kepala sekolah juga mengungkapkan bahwa mereka mengalami kendala dalam melaksanakan perubahan kebijakan, termasuk perubahan kurikulum.

6. Dukungan orang tua tidak maksimal. Rendahnya literasi dan numerasi murid di Kabupaten Sumbawa salah satunya disebabkan oleh rendahnya dukungan orang tua murid yang bersangkutan. UPTD menilai bahwa dukungan orang tua belum maksimal terhadap perkembangan pendidikan anak-anak mereka.
7. Mutu guru dalam mengajar masih kurang. Rendahnya mutu guru dalam mengajar sangat erat dikaitkan dengan porsi perhatian guru terhadap anak yang bermasalah/kurang mampu dalam belajar. Seharusnya dalam proses mengajar guru memperhatikan muridnya satu per satu dan memberikan perhatian sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Dalam berbagai kesempatan, informan selalu menyampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk tidak menyamakan kemampuan semua anak dalam mengajar karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Selain itu, pendidik seharusnya memberi perhatian lebih bukan kepada murid-murid yang pintar di kelas (bernilai bagus) tetapi kepada murid-murid yang memiliki masalah

dalam belajar. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya perbedaan perlakuan yang diberikan guru kepada murid dari golongan ekonomi rendah (keluarga tidak mampu). Sebagian anak dengan masalah belajar menjadi tidak diperhatikan oleh guru karena mereka berasal dari keluarga tidak mampu. Oleh karena itu, informan kerap mendorong masyarakat sekitar untuk lebih aktif dalam menanyakan kepada sekolah tentang hasil pembelajaran anak-anak. Dalam perbincangan kami dengan informan, terlihat sekali bahwa terdapat tantangan yang besar dalam memperbaiki mutu guru. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa banyak guru di wilayah ini yang mendapat ijazahnya tidak melalui proses yang semestinya. Salah satu indikatornya adalah tingkat kelulusan pada seleksi kepala sekolah beberapa waktu lalu; hanya satu guru yang berhasil. Di bidang teknologi informasi, berdasarkan hasil pengamatan dan pengawasan, pengawas sekolah memperkirakan bahwa kemampuan para guru di bidang teknologi informasi masih di bawah rata-rata atau sekitar 50%.

Kemampuan membaca dan menulis anak masih kurang. Kemampuan membaca dan menulis sangat penting bagi murid-murid jenjang pendidikan dasar, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang diterima di sekolah umum. Ketua UPTD di wilayah penelitian memperkirakan bahwa murid-murid yang kemampuan calistungnya bagus baru 70%. Kepala sekolah yang ditemui juga memiliki pandangan bahwa kebiasaan membaca murid masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan calistung ke taraf maksimal. Guru adalah faktor yang sangat penting untuk peningkatan kemampuan calistung. Perkumpulan guru seperti MGMP, KKG, atau gugus guru sangat penting untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran calistung. Namun, UPTD menilai bahwa saat ini gugus guru tidak maksimal. Dukungan orang tua dan fasilitas pembelajaran merupakan faktor-faktor penting lain. Murid-murid perlu diberi motivasi secara terus menerus dan perlu adanya pembelajaran yang menyenangkan bagi murid agar mereka menjadi lebih termotivasi.

Satu hal yang disarankan oleh UPTD adalah perlunya peningkatan kepedulian antarmurid untuk saling mengajar. Cara ini akan memberikan kemudahan bagi murid yang masih kurang pemahamannya tentang materi ajar tertentu. Bertukar pikiran di antara murid-murid atau belajar bersama akan meningkatkan komunikasi antarmurid. Oleh karena itu, diperlukan kepedulian para murid yang lebih pintar untuk membantu meningkatkan pemahaman teman-temannya yang masih kurang tentang suatu materi ajar. Berkaitan dengan hal ini, guru dapat memfasilitasi dan mendorong murid-murid untuk belajar bersama.

Menurut pengawas sekolah, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kemampuan literasi murid masih kurang di Kabupaten Sumbawa karena penyampaian mata pelajaran menggunakan bahasa lokal. Pengawas sekolah juga memberikan saran bahwa calistung yang baik perlu metode pembelajaran yang baik dari guru.

8. Kurangnya sarana dan prasarana. Kurangnya buku menjadi keluhan utama terkait kebutuhan sarana dan prasarana. Permasalahan terkait hal ini yang sedang hangat dibicarakan adalah kurangnya buku-buku penunjang Kurikulum 2013. Kepala UPTD Lopok menilai bahwa hal ini tak terlepas dari ketidakpastian sistem pembelajaran nasional, seperti sering bergantinya kurikulum. Beberapa tahun lalu, setelah dikeluarkannya peraturan tentang Kurikulum 2013, kurikulum ini diujicobakan di beberapa sekolah tetapi tidak berlanjut dan akhirnya diubah kembali ke kurikulum lama, yakni KTSP. Sejak diujicobakan pertama kali hingga saat ini, buku penunjang Kurikulum 2013 belum juga lengkap.
9. Sekolah berakreditasi A masih sangat sedikit. Kualitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa masih berada di posisi menengah di antara semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB. Demikian juga halnya dengan kualitas pendidikan di Kecamatan Lape yang masih biasa-biasa saja (menurut

UPTD Lape). Dua UPTD yang dikunjungi menilai bahwa kualitas pendidikan di Kecamatan Lape dan Kecamatan Lopok berada di posisi menengah bila dilihat dari kualitas keseluruhan sekolah yang ada di Kabupaten Sumbawa. UPTD juga menilai bahwa kapasitas dirinya belum maksimal karena tidak menerima wewenang penuh dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan. Kondisi kualitas pendidikan seperti itu menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di Kabupaten Sumbawa yang berkualitas baik, atau berakreditasi A, masih kurang. Pengawas sekolah juga mengatakan bahwa jumlah sekolah yang berakreditasi A di Kabupaten Sumbawa sangat sedikit. Sekolah berakreditasi A tersebut umumnya menguasai bidang akademik, sedangkan sekolah-sekolah yang kualitasnya berada di bawah berprestasi di bidang nonakademik. Kepala sekolah yang ditemui juga menilai bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa belum memuaskan.

### C. Kelompok Pendukung Kebijakan

Isu-isu teratas dari kelompok pendukung kebijakan dirangkum dari hasil wawancara mendalam dengan ketua Dewan Pendidikan, PGRI, LSM, ketua MGMP SMP, dua kepala desa, dua ketua komite sekolah SD sampel, dua ketua komite sekolah SMP sampel, empat kelompok orang tua murid (dua SD dan dua SMP), dan media lokal. Sepuluh isu teratas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Rangkap jabatan kepala sekolah. Di Kabupaten Sumbawa masih ditemui adanya rangkap jabatan kepala sekolah. Rangkap jabatan ini berakibat pada kurangnya pengawasan terhadap sekolah. Murid berprestasi akademik baik umumnya merupakan hasil dari guru yang berkualitas bagus. Guru yang bagus umumnya hasil dari manajemen sekolah yang bagus. Dan akhirnya manajemen sekolah yang bagus merupakan hasil dari kepala sekolah yang bagus pula. Oleh karena itu, kepala sekolah yang merangkap jabatan akan mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap sekolah yang tentunya akan berpengaruh pada hasil pembelajaran murid.
2. Kekurangan guru PNS. Pengurus PGRI menilai bahwa kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh guru. Di Kabupaten Sumbawa masih terdapat kekurangan guru PNS. Kepala desa juga menilai bahwa masih sedikit guru berstatus PNS. Kekurangan guru PNS ini disiasati dengan mengangkat guru honorer. PGRI menyebutkan bahwa di setiap sekolah pasti ada guru honorer atau GTT. Dewan Pendidikan menilai bahwa dengan adanya pengangkatan guru honorer ini, kebutuhan guru akan tercukupi. Pada umumnya, guru honorer dibayar dengan menggunakan dana dari BOS. Namun, lebih lanjut Dewan Pendidikan menilai bahwa guru honorer yang tidak disiplin dapat mengganggu proses belajar mengajar. Dan kepala desa pun menemukan adanya guru honorer yang tidak disiplin.

Namun, pengurus MGMP memediasikan jika terjadi permasalahan-permasalahan guru dan berusaha mencari jalan keluar untuk membantu penyelesaiannya. Untuk sekolah dasar, PGRI menilai bahwa KKG-lah yang dapat membantu mencari solusinya jika terjadi masalah terkait dengan guru. PGRI berpendapat bahwa murid baik karena gurunya baik dan guru baik karena kepala sekolahnya baik pula. Salah satu pembeda kualitas guru adalah lembaga pendidikan tempat guru menimba ilmu.

3. Keterampilan, pelatihan, dan kesejahteraan guru. Permasalahan keterampilan, pelatihan, dan kesejahteraan guru merupakan isu penting bagi kalangan pendukung pendidikan. Kepala desa berpendapat bahwa masih terdapat permasalahan kualitas dan kesejahteraan guru. Bahkan, media setempat beranggapan bahwa kualitas guru di Kabupaten Sumbawa belum optimal. Salah satu penyebab rendahnya keterampilan dan kualitas guru adalah karena jumlah guru senior terbatas atau guru tidak meningkatkan kapasitas dirinya dalam rangka pengembangan profesi guru. Berkaitan dengan kesejahteraan guru, ketua Dewan Pendidikan menilai bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan guru, terdapat kendala penyaluran dana serifikasi.

4. Pandangan bahwa sekolah gratis. Isu yang sering dilontarkan para pemangku kepentingan adalah adanya kebijakan sekolah gratis yang beberapa tahun terakhir ini dicanangkan untuk jenjang pendidikan dasar. Perubahan sumber pembiayaan sekolah dari masyarakat ke pemerintah (pusat maupun daerah) telah menyebabkan bergesernya pandangan masyarakat tentang tanggung jawab sekolah. Dengan adanya kebijakan sekolah gratis ini, masyarakat berpikir bahwa seluruh urusan sekolah anak-anaknya diserahkan kepada pemerintah melalui sekolah (dan guru serta kepala sekolah). Menurut ketua Dewan Pendidikan, pandangan bahwa sekolah gratis harus diluruskan. Dengan kebijakan sekolah gratis ini bukan berarti bahwa seluruh tanggung jawab pendidikan murid diserahkan kepada pihak sekolah; orang tua masih tetap bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan anak-anaknya.
5. Kurangnya fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hasil pembelajaran murid di Kabupaten Sumbawa. Fasilitas sekolah, seperti alat peraga, media pembelajaran, perpustakaan dan buku-bukunya, serta perlengkapan laboratorium, masih menjadi kendala di sekolah-sekolah di Kabupaten Sumbawa. Hal ini disampaikan juga oleh kepala desa yang menilai bahwa fasilitas penunjang pendidikan masih kurang. Media menilai bahwa sarana dan prasarana di daerah terpencil masih menjadi masalah. Kurangnya fasilitas sekolah ini memengaruhi pemahaman murid mengenai suatu masalah dalam proses pembelajaran. Kurangnya pemahaman akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran.
6. Kunjungan murid ke perpustakaan kurang. Untuk meningkatkan hasil pembelajaran, selain memperoleh pengajaran dari guru, murid tentunya juga harus mengembangkan diri dengan belajar mandiri. Salah satu caranya adalah dengan membaca buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah. Namun, kunjungan murid ke perpustakaan masih sangat kurang. Mereka kadang malah tidak hadir di sekolah karena harus membantu orang tua mencari nafkah. Ketua Dewan Pendidikan menemukan bahwa terdapat anak sekolah yang bekerja sebagai nelayan. Pengurus MGMP juga menilai bahwa kunjungan murid ke perpustakaan masih kurang.
7. Sekolah tidak mudah diakses. Hasil pembelajaran juga dipengaruhi hasil tatap muka guru dan murid. Pertemuan guru dan murid yang rutin akan memudahkan komunikasi pembelajaran. Hal ini akan sangat mudah terjadi bagi sekolah-sekolah di perkotaan yang memiliki fasilitas yang memadai dan mudah dijangkau. Namun, tidak demikian halnya dengan sekolah di perdesaan yang aksesnya sulit. Di Kabupaten Sumbawa masih ditemukan adanya kecamatan yang sulit dijangkau. Pengurus MGMP menilai adanya perbedaan antara pendidikan di perkotaan dan di perdesaan.
8. Dukungan orang tua kurang. Dukungan orang tua sangat penting bagi perkembangan anak. Namun, sering kali ditemui orang tua yang menyerahkan tanggung jawab pendidikan anaknya sepenuhnya kepada sekolah. Bahkan, terdapat anak sekolah yang bekerja membantu mencari nafkah untuk menambah penghasilan keluarga. Kepala desa menilai bahwa dukungan orang tua untuk pendidikan anak-anaknya masih rendah. Ia menambahkan bahwa hal itu merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang sudah berlangsung sejak lama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika anak-anak didik dari keluarga miskin prestasinya rendah. Berkaitan dengan hal pembelajaran, pihak kantor desa tidak ikut berkontribusi kecuali dalam pemberian surat keterangan tidak mampu dan seleksi anak yang berhak mendapat program bantuan PNPM Generasi dan Cerdas. MGMP menilai bahwa anak dari keluarga kurang mampu tidak mendapat perhatian yang cukup dari orang tua mereka. Keluarga yang tidak harmonis juga memengaruhi pembelajaran anak.

9. Penguasaan teknologi informasi dan peningkatan kemampuan guru. Teknologi informasi sangat penting dalam proses pembelajaran. Teknologi informasi dapat menjadi sarana yang menarik dalam proses pembelajaran sehingga murid tidak bosan. Misalnya, penjelasan mata pelajaran melalui visualisasi LCD dapat menarik perhatian murid untuk menyimak pelajaran yang sedang diajarkan. Penampilan gambar dan kata yang tepat akan memudahkan murid dalam menangkap makna pelajaran yang diajarkan. Namun, tidak semua guru dapat menyampaikan materi ajar dengan menggunakan metode pembelajaran ini. Selain karena terbatasnya sarana dan prasarana, kalangan media setempat menilai bahwa guru tidak menguasai teknologi informasi.
  
10. Perubahan kebijakan pemerintah berpengaruh pada hasil pembelajaran. Para pemangku kepentingan di Kabupaten Sumbawa berharap agar kebijakan yang diimplementasikan di daerah sudah dipikirkan secara matang teknis pelaksanaannya, kemungkinan hambatan yang akan timbul, ataupun permasalahan lainnya. Perubahan kurikulum dalam waktu yang berdekatan merupakan masalah yang sering menjadi perbincangan. Hal ini berdampak tidak saja pada proses pembelajaran tetapi juga pada pengadaan sarana dan prasarana baik bagi guru maupun murid. Media menyoroti bahwa perubahan kebijakan ini berpengaruh terhadap pembelajaran murid. Oleh karena itu, media berkomitmen untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Media juga mengharapkan agar pengawas sekolah disiplin dalam melakukan fungsi pengawasannya. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara media dan Dinas Pendidikan.

## LAMPIRAN 2

Tabel A1. Ringkasan Metode Komunikasi

	Kelompok Pemangku Kepentingan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
PEMBUAT KEBIJAKAN	Kabid Dikdas dan Kasi Kurikulum, Dinas Diknas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (suara, tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat</li> <li>• Telepon</li> <li>• Layanan pesan singkat (<i>short message service</i>/SMS)</li> <li>• Surat elektronik (surel)</li> <li>• Surat edaran (satu arah)</li> <li>• Koran (media cetak)</li> <li>• Facebook</li> <li>• WhatsApp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi</li> <li>• FIG</li> <li>• MGMP</li> <li>• Jurnal Pendidikan Samawa (PTK)–ber-ISSN</li> <li>• Jurnal Pendidikan Samawa (PTK)–ber-ISSN</li> <li>• Media cetak yang menjadi mitra Dinas Pendidikan untuk menyampaikan berita terkait pendidikan</li> <li>• Milis Jurnal Pendidikan Samawa</li> <li>• Grup WhatsApp (MGMP)</li> <li>• Grup WhatsApp (FIG)</li> <li>• Grup WhatsApp (Bappeda)</li> <li>• Grup WhatsApp (Sahabat)</li> <li>• Grup WhatsApp (Nusantara)</li> <li>• Facebook resmi Dinas Pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draf tulisan untuk Jurnal Pendidikan Samawa</li> <li>• Surel digunakan untuk mengirim undangan/surat edaran dinas dan menerima undangan dinas</li> </ul>
	Kabid Sosbud Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (suara, tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat</li> <li>• Berbagi data, yaitu data resmi dari BPS, UPTD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial (<i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i>)</li> <li>• Telepon</li> <li>• Radio Pemerintah Daerah (RPD)</li> <li>• SMS</li> <li>• Surel (untuk berbagi atau mengirim undangan/informasi)</li> <li>• Surat edaran (satu arah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi</li> <li>• Kunjungan untuk meminta/mengantar data</li> <li>• Musrenbang: kabupaten dan kecamatan (peserta paling banyak berasal dari kalangan pendidik: UPTD, pengawas, guru)</li> <li>• Memperbarui status di Facebook yang berisi informasi terkait pembangunan daerah</li> <li>• Grup WhatsApp (Bappeda) yang anggotanya: staf Bappeda, Bappeda Provinsi, Dinas Pendidikan, DPRD, Perpustakaan Daerah, dan para pimpinan SKPD lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RPD berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), tetapi beritanya dari humas Setda Sumbawa (berita seputar kegiatan bupati dan pembangunan)</li> <li>• Status Facebook biasanya dibaca dan dikomentari oleh pemangku kepentingan terkait</li> </ul>

Kelompok Pemangku Kepentingan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koran (media cetak)</li> <li>• Facebook</li> <li>• WhatsApp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grup WhatsApp (Sahabat). Anggotanya: SKPD Sumbawa, camat, masyarakat, SKPD kabupaten lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berlangganan media cetak (koran) lokal untuk mendapatkan informasi</li> </ul>	
Asisten Pemerintahan Sekda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (suara, tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat</li> <li>• Telepon</li> <li>• SMS</li> <li>• Surat</li> <li>• WhatsApp</li> <li>• Facebook</li> <li>• Surel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat edaran</li> <li>• Peraturan bupati</li> <li>• Publikasi media</li> <li>• Publikasi internet</li> </ul>		
Anggota Komisi IV DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (suara, tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat</li> <li>• Telepon</li> <li>• SMS</li> <li>• Surat keputusan DPRD (satu arah)</li> <li>• WhatsApp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat-rapat DPRD (komisi, paripurna, dan lainnya)</li> <li>• Dengar pendapat berdasarkan laporan yang masuk dari masyarakat (DPRD akan memanggil dinas terkait)</li> <li>• Berbagai group WhatsApp (sebagian beririsan dengan Dinas Pendidikan dan Bappeda)</li> </ul>		
PELAKSANA KEBIJAKAN	Pengawas sekolah SD A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (suara, tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatap muka langsung di rapat</li> <li>• Kunjungan langsung ke sekolah-sekolah</li> <li>• Telepon</li> <li>• SMS</li> <li>• Surel</li> <li>• Internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat</li> <li>• Kunjungan ke sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari informasi di internet</li> </ul>
	Pengawas sekolah SD B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (suara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatap muka langsung di rapat</li> <li>• Kunjungan langsung ke sekolah-sekolah</li> <li>• Telepon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi semua kepala sekolah di rumah informan</li> <li>• Kunjungan di sekolah dan <i>sit-in</i> di kelas</li> <li>• Rapat pengawas sekolah</li> </ul>	

Kelompok Pemangku Kepentingan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
Pengawas sekolah SMP A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (suara, tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat</li> <li>Kunjungan langsung ke sekolah-sekolah</li> <li>Telepon</li> <li>SMS</li> <li>WhatsApp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MGMP PKN Sumbawa</li> <li>Rapat pengawas sekolah</li> <li>Kunjungan di sekolah dan <i>sit-in</i> di kelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berbagai grup WhatsApp (MGMP PKN Nusantara, pengawas sekolah)</li> <li>Berbagai informasi yang terkait dengan tugas pengawas sekolah yang dikelola oleh operator di kantor pengawas sekolah dan dikirim ke semua pengawas sekolah</li> </ul>
Pengawas sekolah SMP B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (suara, tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat</li> <li>Telepon</li> <li>SMS</li> <li>WhatsApp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Group WhatsApp pengawas sekolah</li> <li>Group WhatsApp pengawas sekolah dengan sekolah binaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat MKPS dua kali setahun</li> </ul>
UPTD: Kepala UPTD Lape	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (suara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tatap muka langsung di rapat</li> <li>Telepon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertemuan koordinasi di kecamatan (rutin): kecamatan, desa, pengawas sekolah, komite sekolah, sekolah</li> <li>Rapat komite sekolah</li> <li>Rapat bulanan dengan sekolah-sekolah di wilayahnya</li> <li>Rapat-rapat koordinasi dengan SKPD terkait</li> </ul>	
Kepala UPTD Lopok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (suara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tatap muka langsung di rapat</li> <li>Telepon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertemuan koordinasi di kecamatan (rutin): kecamatan, desa, pengawas sekolah, komite sekolah, sekolah</li> <li>Rapat komite</li> <li>Rapat bulanan dengan sekolah-sekolah di wilayahnya</li> <li>Rapat-rapat koordinasi dengan SKPD terkait</li> </ul>	
Kepala sekolah SD A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (suara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat</li> <li>Telepon</li> <li>SMS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat KKG (sebagai sekolah inti dan ketua gugus)</li> </ul>	

Kelompok Pemangku Kepentingan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> </ul>			
Kepala sekolah SD B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (suara)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertemu langsung</li> <li>Rapat</li> <li>Kunjungan rumah</li> <li>Telepon</li> <li>SMS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kunjungan rumah ke anak-anak yang bermasalah</li> <li>Bertemu dan menjalin komunikasi dengan orang tua murid, komite sekolah, kepala dusun, dan tokoh masyarakat setempat</li> <li>Pertemuan kepala sekolah (dalam satu gugus)</li> </ul>	
Wakil kepala sekolah SMP A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (suara)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat</li> <li>Telepon</li> <li>SMS</li> <li>WhatsApp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berbagai grup WhatsApp (MGMP PKN Sumbawa, MGMP PKN Nusantara)</li> <li>MGMP PKN Sumbawa</li> <li>MGMP PKN Nusantara</li> </ul>	
Kepala sekolah SMP B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (suara)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kunjungan rumah</li> <li>Rapat</li> <li>Telepon</li> <li>SMS</li> <li>Surel</li> <li>Facebook</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan kunjungan rumah dilakukan melalui guru BK</li> <li>Rapat komite sekolah dua kali setahun</li> <li>Rapat koordinasi ke atas dan ke bawah</li> <li>Rapat internal sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Punya akun Facebook untuk keperluan pribadi, bukan untuk pekerjaan</li> </ul>
Guru				
Kelompok guru SD A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (suara)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat</li> <li>Kunjungan rumah</li> <li>Telepon</li> <li>SMS</li> <li>Surel</li> <li>WhatsApp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KKG</li> </ul>	

Kelompok Pemangku Kepentingan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facebook</li> </ul>		
Kelompok guru SD B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (suara)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat</li> <li>Kunjungan rumah</li> <li>Telepon</li> <li>SMS</li> <li>Surel</li> <li>WhatsApp</li> <li>Facebook</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KKG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengirim surel dilakukan dengan menumpang ke sekolah lain yang telah terjangkau jaringan internet</li> <li>WhatsApp dan Facebook hanya digunakan di luar jam sekolah karena ketiadaan akses internet di sekolah</li> </ul>
Kelompok guru SMP A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (suara)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat</li> <li>Kunjungan rumah</li> <li>Telepon</li> <li>SMS</li> <li>Surel</li> <li>WhatsApp</li> <li>Facebook</li> <li>Internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berbagai grup WhatsApp (MGMP, Bahasa Inggris)</li> <li>Internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada guru yang mengikuti pelatihan yang disponsori oleh Brunei Darussalam berkat informasi yang didapatkannya dari Facebook</li> </ul>
Kelompok guru SMP B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (suara)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat</li> <li>Kunjungan rumah</li> <li>Telepon</li> <li>SMS</li> <li>Surel</li> <li>WhatsApp</li> <li>Facebook</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kunjungan rumah oleh guru BK</li> <li>Rapat guru</li> <li>Pertemuan MGMP</li> <li>Pelatihan guru</li> <li>Berbagai grup WhatsApp (untuk guru Matematika bahkan ikut dalam grup WA lintas jenjang kelas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selain sudah memanfaatkan WhatsApp dan Facebook, sebagian guru sudah memanfaatkan IMO dan Instagram untuk keperluan pribadi (bukan pekerjaan)</li> </ul>

Kelompok Pemangku Kepentingan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan	
Yayasan Pendidikan Nahdlatul Wathan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (suara)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat</li> <li>• Seminar (menjadi peserta atau pun menjadi narasumber)</li> <li>• Telepon</li> <li>• SMS</li> <li>• Surel</li> <li>• Buku (menulis di buku, artikel, ataupun jurnal)</li> <li>• WhatsApp</li> <li>• Facebook</li> <li>• Internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karya tulis informan di buku atau terbitan tertulis lain seperti jurnal (salah satunya adalah menjadi pengulas untuk Jurnal Pendidikan Samawa)</li> <li>• Berbagai group WhatsApp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membagi/mendapat informasi/pengetahuan dalam seminar</li> </ul>	
PENDUKUNG KEBIJAKAN	Ketua Dewan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (suara)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatap muka langsung</li> <li>• Telepon</li> <li>• Surat</li> <li>• SMS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja sama dengan beberapa komite sekolah</li> </ul>	
	PGRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (suara)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat</li> <li>• Telepon</li> <li>• SMS</li> <li>• Surel</li> <li>• WhatsApp</li> <li>• Facebook</li> <li>• Internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi dengan atas dan bawah (mulai dari PGRI nasional hingga kecamatan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informan juga memiliki akun Instagram, tetapi hanya untuk kepentingan pribadi</li> </ul>
	Ketua MGMP Matematika SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (suara)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatap muka</li> <li>• Telepon</li> <li>• Surel</li> <li>• Facebook</li> <li>• Kunjungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum guru</li> <li>• Pertemuan rutin</li> <li>• Kunjungan guru</li> </ul>	

Kelompok Pemangku Kepentingan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)</li> </ul>			
Komite Sekolah				
Ketua Komite SD A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (suara)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat</li> <li>Kunjungan ke murid</li> <li>Surat</li> <li>Telepon</li> <li>SMS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat komite sekolah</li> <li>Kunjungan ke murid melalui kelompok belajar masing-masing dusun yang dibentuk untuk memastikan kegiatan belajar kelompok berjalan di dusunnya</li> <li>Koordinasi pembangunan fisik sekolah dilakukan oleh komite sekolah per dusun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang komite sekolah yang disediakan oleh sekolah</li> </ul>
Ketua Komite SD B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (suara)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat</li> <li>Telepon</li> <li>SMS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi komite sekolah dengan kepala sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komite sekolah di SD B sudah tidak aktif sejak tiga tahun terakhir. Jika ada kegiatan sekolah yang berkaitan dengan komite sekolah, maka pihak sekolah mengundang mantan pengurus, khususnya ketua.</li> </ul>
Ketua Komite Sekolah SMP A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (suara)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat</li> <li>Telepon</li> <li>SMS</li> <li>Surat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat dengan orang tua murid</li> <li>Rapat komite sekolah</li> </ul>	
Ketua Komite Sekolah SMP B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (suara)</li> <li>Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat</li> <li>Telepon</li> <li>SMS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat pengurus komite sekolah</li> </ul>	
Orang Tua				

Kelompok Pemangku Kepentingan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
Ornop (Direktur Lembaga Psikologi Pelangi Harapan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (suara)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatap muka langsung</li> <li>• Telepon</li> <li>• SMS</li> <li>• Surat</li> <li>• Mencetak buku</li> <li>• Membuat video (CD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadi narasumber: seminar, presentasi</li> <li>• Memberi pelatihan</li> <li>• Buku dan video (CD) tentang kegiatan mengajar joki anak-anak</li> <li>• Mengajar anak-anak yang menjadi joki anak-anak</li> </ul>	
OMS				
Media Lokal (Redaktur Pelaksana Koran Gaung NTB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liputan langsung</li> <li>• Menempatkan wartawan di Dinas Pendidikan</li> <li>• Telepon</li> <li>• SMS</li> <li>• Media cetak (koran)</li> <li>• Facebook</li> <li>• Situs web</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan dari wartawan atau koresponden</li> <li>• Laporan dari wartawan atau koresponden</li> <li>• Laporan dari masyarakat (ke nomor telepon yang telah disediakan)</li> <li>• Laporan dari wartawan atau koresponden</li> <li>• Laporan dari masyarakat (ke nomor telepon yang telah disediakan)</li> <li>• Menyampaikan berita di koran Gaung NTB</li> <li>• Menyampaikan berita di situs web</li> </ul>	
Murid				
SASARAN KEBIJAKAN	Murid SD A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertemu langsung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum banyak yang memiliki alat komunikasi maupun menggunakannya untuk mengakses media sosial</li> </ul>
	Murid SD B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertemu langsung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya sedikit yang memiliki telepon genggam</li> <li>• Daerah Kuris tidak terjangkau jaringan internet yang baik</li> </ul>

Kelompok Pemangku Kepentingan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
Murid SMP A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi langsung (tatap muka)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (tulisan)</li> <li>• Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertemu langsung</li> <li>• Telepon</li> <li>• SMS</li> <li>• BBM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian besar punya telepon genggam yang biasa digunakan untuk mengakses Facebook. Untuk laki-laki, telepon genggam juga digunakan untuk mengakses BBM, Twitter, internet, dan situs jual beli daring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengakses internet untuk mencari bahan pelajaran (dengan memanfaatkan mesin pencari seperti Google)</li> <li>• Ada murid yang memanfaatkan keberadaan situs jual beli daring untuk menjual dagangannya</li> </ul>
Murid SMP B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi langsung (tatap muka)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertemu langsung</li> </ul>		

## LAMPIRAN 3

### Daftar Mitra Potensial untuk Inovasi dan Forum Dialog di Daerah

Berikut ini adalah daftar mitra potensial untuk inovasi dan forum dialog di daerah yang dikelompokkan berdasarkan pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pendukung kebijakan di Kabupaten Sumbawa.

No.	Kelompok Pemangku Kepentingan	Keterangan
I	Pembuat Kebijakan	
1	Dinas Diknas	Kepala Bidang Pendidikan Dasar
2	Dinas Diknas	Kepala Seksi Kurikulum
3	Bappeda	Kepala Bidang Sosial dan Budaya
4	Asisten Pemerintahan	Sekda
5	DPRD	Anggota Komisi IV
6	Bupati	
II	Pelaksana Kebijakan	
1	UPTD	Kepala UPTD Lape Kepala UPTD Lopok
	Pengawas sekolah	Pengawas sekolah SD A Pengawas sekolah SD B Pengawas sekolah SMP A Pengawas sekolah SMP B
2	Kepala sekolah	Kepala sekolah SD A Kepala sekolah SD B Wakil kepala sekolah SMP A Kepala sekolah SMP B
3	Guru	
4	Yayasan pendidikan	Yayasan Pendidikan Nahdlatul Wathan
III	Pendukung Kebijakan	
1	Ornop	Direktur Lembaga Psikologi Pelangi Harapan
2	Dewan Pendidikan	Ketua
3	PGRI	
4	Kepala desa	Sekretaris desa Desa 2 Kepala desa Desa 1
5	Media massa	Redaktur pelaksana Koran Gaung NTB

## LAMPIRAN 4

**Tabel A2. Matriks Nilai Pemangku Kepentingan**

Matriks nilai pemangku kepentingan mencakup berbagai pemangku kepentingan hasil pembelajaran di Kabupaten Sumbawa yang dikelompokkan menjadi empat kelompok.

Kelompok Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi	Kemauan untuk Terlibat	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran	Pentingnya Pemangku Kepentingan Dilibatkan	
	Tinggi/Menengah/Rendah				
PEMBUAT KEBIJAKAN	Kabid Dikdas dan Kasi Kurikulum, Dinas Diknas	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabid Dikdas menangani langsung pendidikan dasar, termasuk pembinaan dan pengawasan guru</li> <li>• Memiliki inovasi peningkatan mutu guru dengan penerbitan jurnal</li> </ul>	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turun langsung melakukan bimbingan dan pembinaan di sekolah melalui pengawas sekolah</li> <li>• Mendorong adanya pelatihan kapasitas bagi para guru</li> </ul>	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai aktor terdepan dalam bidang pendidikan di tingkat kabupaten</li> <li>• Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pendidikan di tingkat kabupaten</li> <li>• Menerbitkan jurnal ilmiah</li> </ul>	Tinggi karena sebagai aktor terdepan di bidang pendidikan
	Kabid Sosbud Bappeda	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabid Sosbud mengoordinasi pemangku kepentingan pendidikan di tingkat kabupaten</li> <li>• Sebagai pengatur uang dan penyusun prioritas pembangunan di tingkat kabupaten</li> </ul>	Tinggi karena merupakan perencana pembangunan di kabupaten	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengundang akademisi dan peneliti untuk hadir di rapat teknis</li> <li>• Memprioritaskan sektor pendidikan</li> </ul>	Tinggi karena sebagai koordinator pemangku kepentingan di bidang pendidikan, termasuk bidang lainnya
	Asisten Pemerintahan Sekda	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpengalaman sebagai kepala Dinas Pendidikan</li> <li>• Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain terkait kebijakan daerah</li> </ul>	Tinggi karena mengoordinasi bidang pendidikan	Tinggi karena mengoordinasi pemangku kepentingan	Tinggi karena sebagai koordinator

	Kelompok Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi	Kemauan untuk Terlibat	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran	Pentingnya Pemangku Kepentingan Dilibatkan
		Tinggi/Menengah/Rendah			
	Anggota Komisi IV DPRD	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai fungsi penganggaran</li> <li>• Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain di tingkat kabupaten</li> <li>• Menindaklanjuti laporan masyarakat</li> </ul>	Tinggi karena memiliki hak penganggaran	Tinggi karena memiliki hak penganggaran, menindaklanjuti laporan masyarakat, dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang pendidikan	
	Bupati				
PELAKSANA KEBIJAKAN	Pengawas: - Pengawas sekolah SD A - Pengawas sekolah SD B - Pengawas sekolah SMP A - Pengawas sekolah SMP B	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan</li> <li>• Memiliki sekolah binaan</li> <li>• Melakukan evaluasi guru dan kepala sekolah</li> </ul>	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengawasan sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan</li> <li>• Membina sekolah</li> <li>• Mengevaluasi guru dan kepala sekolah</li> </ul>	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengawasan sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan</li> <li>• Membina sekolah</li> <li>• Mengevaluasi guru dan kepala sekolah</li> </ul>	
	UPTD: - Kepala UPTD Lape - Kepala UPTD Lopok	Menengah karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diberi wewenang penuh</li> <li>• Menangani masalah yang tidak berat</li> </ul>	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menangani permasalahan pendidikan</li> <li>• Perlu koordinasi dengan dinas dan DPRD</li> </ul>	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkaitan langsung dengan permasalahan pendidikan di wilayahnya</li> <li>• Koordinasi</li> </ul>	
	Kepala sekolah: - Kepala sekolah SD A - Kepala sekolah SD B - Kepala sekolah SD B	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan penyelenggara dan manajemen sekolah</li> <li>• Memberikan pelatihan bagi guru-guru</li> </ul>	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan manajemen sekolah, termasuk guru dan murid</li> <li>• Memberikan pelatihan-pelatihan bagi guru</li> </ul>	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan manajemen sekolah, termasuk guru dan murid</li> <li>• Memberikan pelatihan-pelatihan bagi guru</li> </ul>	

Kelompok Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi	Kemauan untuk Terlibat	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran	Pentingnya Pemangku Kepentingan Dilibatkan
	Tinggi/Menengah/Rendah			
- Kepala sekolah SMP B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membina kerja sama sekolah dengan komite sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekerja sama dengan komite sekolah dan orang tua murid</li> <li>Berkoordinasi dengan sekolah lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekerja sama dengan komite sekolah dan orang tua murid</li> <li>Berkoordinasi dengan sekolah lain</li> </ul>	
Guru	<p>Tinggi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Langsung mengajar murid</li> <li>Memberikan pembelajaran langsung</li> <li>Memotivasi murid</li> </ul>	<p>Tinggi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan dan menghadapi langsung tantangan yang ada</li> <li>Mengubah cara pembelajaran agar bisa memenuhi daya serap ilmu murid</li> <li>Memberikan pembelajaran langsung ke alam</li> <li>Melakukan kegiatan dengan mendatangkan tenaga ahlinya</li> </ul>	<p>Tinggi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengajar dan berinteraksi secara langsung dengan murid</li> <li>Melakukan improvisasi dalam pembelajaran</li> </ul>	
Yayasan Pendidikan Nahdlatul Wathan	<p>Tinggi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan penyelenggara pendidikan pendidikan dasar bahkan hingga menengah</li> <li>Menganalisis dan menyelesaikan permasalahan pendidikan</li> <li>Memberikan solusi alternatif permasalahan pendidikan melalui berbagai tulisan</li> <li>Memberikan motivasi pendidikan, terutama bagi masyarakat desa</li> </ul>	<p>Tinggi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pendidikan dasar</li> <li>Memberikan motivasi</li> <li>Berkontribusi pada perkembangan pendidikan</li> </ul>	<p>Tinggi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pendidikan dasar</li> <li>Memberikan motivasi</li> <li>Berkontribusi pada perkembangan pendidikan</li> </ul>	
PENDUKU NG Ketua Dewan Pendidikan	<p>Menengah karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan dasar</li> <li>Berkaitan dengan kualitas, belum mengetahui persis guru-</li> </ul>	<p>Tinggi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan pelaksana supervisi dalam pendidikan dasar</li> </ul>	<p>Menengah karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan pelaksana supervisi dalam pendidikan dasar</li> </ul>	

Kelompok Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi	Kemauan untuk Terlibat	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran	Pentingnya Pemangku Kepentingan Dilibatkan
	Tinggi/Menengah/Rendah			
	<p>guru bidang literasi dan numerasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil kerja ke Dinas Pendidikan</li> <li>Bekerja sama dengan komite-komite sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekerja sama dengan komite-komite sekolah yang ada di tingkat kabupaten</li> <li>Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bekerja sama dengan komite-komite sekolah</li> <li>Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan</li> <li>Memberikan pertimbangan anggaran ke dinas</li> </ul>	
PGRI	<p>Menengah karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pelatihan terkait kurikulum</li> <li>Berperan sebagai instruktur</li> <li>Melakukan pengawasan</li> <li>Mengurus guru-guru PNS saja</li> </ul>	<p>Menengah karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan profesionalisme guru</li> <li>Berkoordinasi dengan LPMP</li> </ul>	<p>Menengah karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan profesionalisme guru</li> <li>Program-program belum terlaksana</li> <li>Berkoordinasi dengan LPMP</li> </ul>	
Ketua MGMP Matematika SMP	<p>Tinggi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berkaitan langsung dengan mata pelajaran</li> <li>Mengembangkan media pembelajaran</li> <li>Menyusun program pembelajaran secara bersama-sama</li> <li>Jika ada permasalahan, diselesaikan atau dicari solusi secara bersama dalam MGMP</li> <li>Bersifat mandiri</li> </ul>	<p>Tinggi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memediasikan permasalahan guru sekaligus mencari solusi pemecahan permasalahannya</li> <li>Mempraktikkan hasil dari forum di sekolah</li> <li>Melibatkan pengawas sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan</li> </ul>	<p>Tinggi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berkaitan langsung dengan mata pelajaran</li> <li>Mengembangkan media pembelajaran</li> <li>Menyusun program pembelajaran secara bersama-sama</li> <li>Memediasikan permasalahan guru sekaligus mencari solusi pemecahan permasalahannya</li> <li>Mempraktikkan hasil dari forum di sekolah</li> </ul>	
Komite sekolah	<p>Tinggi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan saran untuk peningkatan hasil pembelajaran</li> <li>Memberikan bantuan kepada sekolah baik yang bersifat fisik dan mendukung pembelajaran</li> </ul>	<p>Tinggi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan saran untuk peningkatan hasil pembelajaran</li> <li>Memberikan bantuan kepada sekolah baik yang bersifat fisik dan</li> </ul>	<p>Tinggi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan saran untuk peningkatan hasil pembelajaran</li> <li>Memberikan bantuan kepada sekolah baik yang bersifat fisik dan</li> </ul>	

Kelompok Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi	Kemauan untuk Terlibat	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran	Pentingnya Pemangku Kepentingan Dilibatkan
	Tinggi/Menengah/Rendah			
	maupun yang sifatnya saran/usulan	mendukung pembelajaran maupun yang sifatnya saran/usulan	mendukung pembelajaran maupun yang sifatnya saran/usulan	
Orang tua	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>Berkaitan dengan anak didik</li> <li>Mendukung anak didik terutama di luar sekolah</li> <li>Mendukung sekolah melalui usulan-usulan terkait moral, teknologi, dan fasilitas sekolah</li> </ul>	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>Berkaitan dengan anak didik</li> <li>Mendukung anak didik terutama di luar sekolah</li> <li>Mendukung sekolah melalui usulan-usulan terkait moral, teknologi, dan fasilitas sekolah</li> </ul>	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>Berkaitan dengan anak didik</li> <li>Mendukung anak didik terutama di luar sekolah</li> <li>Mendukung sekolah melalui usulan-usulan terkait moral, teknologi, dan fasilitas sekolah</li> </ul>	
Ornop (Direktur Lembaga Psikologi Pelangi Harapan)	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu kelompok dengan bakat khusus</li> <li>Membantu di bidang pembelajaran</li> <li>Bekerja sama dengan lembaga psikologi</li> <li>Memberikan pelatihan terkait hasil pembelajaran</li> </ul>	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu kelompok dengan bakat khusus bahkan dalam cakupan yang lebih luas seperti anak-anak dari TKI/TKW</li> <li>Membantu di bidang pembelajaran</li> <li>Bekerja sama dengan lembaga psikologi</li> <li>Memberikan pelatihan terkait hasil pembelajaran</li> </ul>	Tinggi karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan dan mendirikan sekolah komunitas untuk joki anak-anak</li> <li>Memberikan pelatihan-pelatihan</li> <li>Melakukan penelitian terkait pendidikan</li> <li>Mendorong agar guru memiliki kemampuan standar dalam mengajar</li> <li>Berkeinginan memiliki pusat pembelajaran, pusat rehabilitasi hukum</li> </ul>	
OMS				
Media Lokal (Redaktur Pelaksana Koran Gaung NTB)	Menengah karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>Media sebagai kontrol</li> <li>Media mengawal kebijakan pemerintah</li> </ul>	Menengah karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>Media sebagai kontrol</li> <li>Media mengawal kebijakan pemerintah</li> </ul>	Menengah karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>Media sebagai kontrol</li> <li>Media mengawal kebijakan pemerintah</li> </ul>	

Kelompok Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi	Kemauan untuk Terlibat	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran	Pentingnya Pemangku Kepentingan Dilibatkan
	Tinggi/Menengah/Rendah			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja sama dengan Dinas Pendidikan dengan memberikan informasi tentang pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja sama dengan Dinas Pendidikan dengan memberikan informasi tentang pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja sama dengan Dinas Pendidikan</li> </ul>	
SASARAN	<p>Murid</p> <p>Tinggi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan pelaksana pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah</li> <li>• Memerlukan jam pelajaran tambahan untuk bidang-bidang ilmu tertentu</li> </ul>	<p>Tinggi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivasi tinggi</li> <li>• Belajar kelompok memberikan motivasi dan peningkatan pengetahuan pada bidang yang dipelajari</li> </ul>	<p>Tinggi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan media yang bervariasi</li> <li>• Menggunakan teknologi yang bisa dimanfaatkan</li> </ul>	

## LAMPIRAN 5

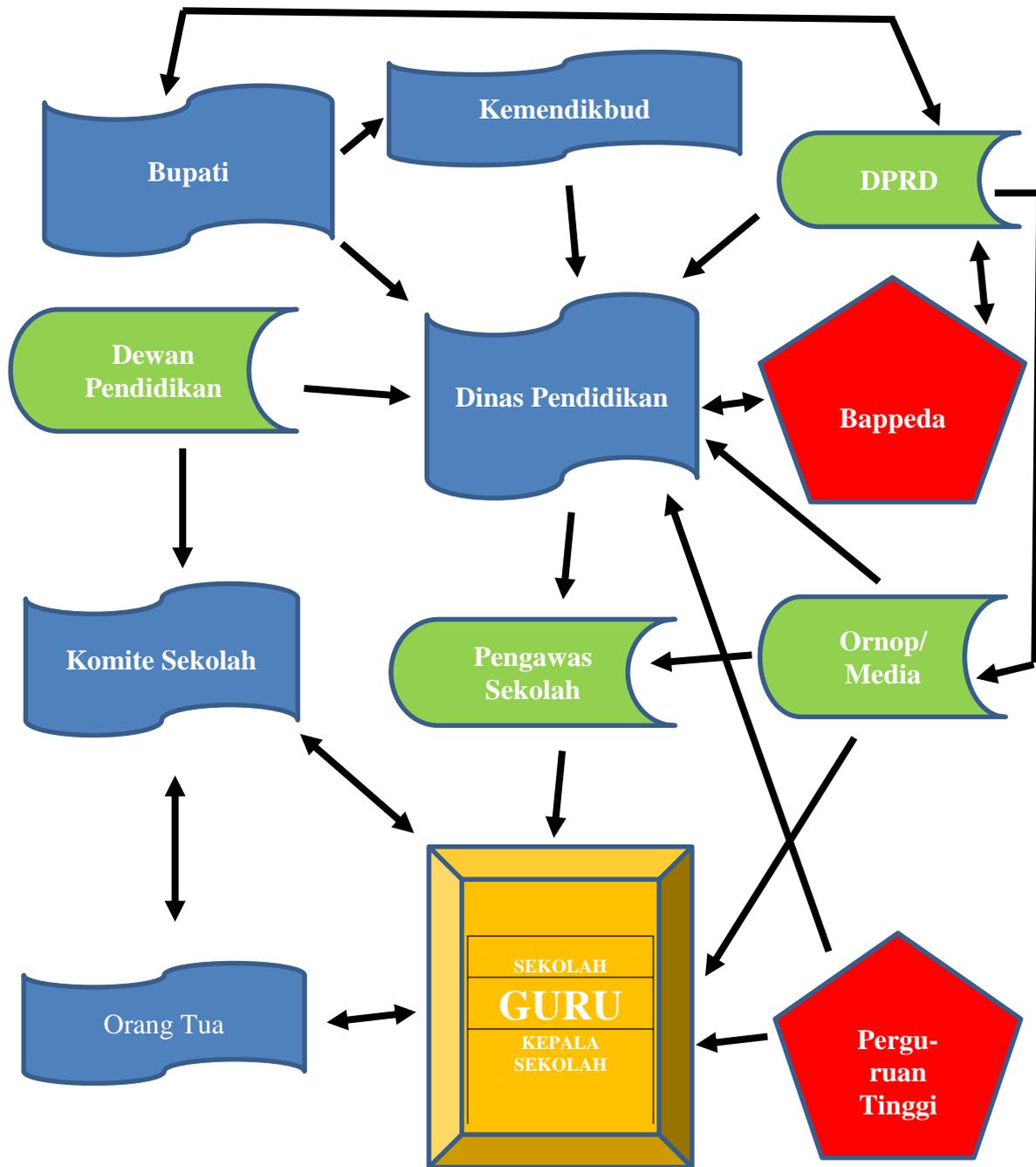
### Peta Pemangku Kepentingan

- Bupati dan Bappeda memiliki posisi yang tinggi karena menyangkut kebijakan. Nantinya penjabaran keinginan bupati dilakukan melalui Bappeda yang berkoordinasi dengan SKPD lain.
- Dalam pembelajaran, posisi tidak perlu tinggi. Keinginan mungkin bisa tinggi tetapi tidak berpengaruh langsung pada pembelajaran. Bappeda dan bupati memiliki posisi yang tinggi tetapi tidak bisa langsung melakukan intervensi ke kelas. Dinas Diknas memiliki posisi tertinggi; misalnya, ketika hasil pembelajaran rendah, bupati dan Bappeda tidak bisa langsung disalahkan.
- Bappeda mengejawantahkan visi dan misi bupati dalam anggaran. Bupati menjadi kunci. Jika bupati tidak memiliki keinginan untuk memajukan pendidikan, maka visi dan misi terkait pendidikan tidak bisa dibahasakan dalam kebijakan.
- Bupati memang tidak berpengaruh langsung pada pembelajaran di kelas tetapi memiliki pengaruh yang besar karena bupati dapat membuat kebijakan untuk memajukan pendidikan.
- Secara kelembagaan, UPTD memiliki pengaruh besar tetapi selama ini tidak berperan secara maksimal. Selama ini, jika sekolah langsung ke Dinas Pendidikan, berarti UPTD tidak berperan.



## LAMPIRAN 6

### Analisis Jejaring Pemangku Kepentingan



#### Keterangan:



Diagram di atas menunjukkan jejaring pemangku kepentingan dalam mempengaruhi hasil pembelajaran. Guru menjadi pusat yang menentukan hasil pembelajaran. Namun, guru juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di sekolah, khususnya kepala sekolah dan fasilitas pembelajaran.

Kerjasama sekolah dengan orang tua dan komite sekolah sangat penting, di samping kerjasama dengan pengawas sekolah dan ornop, serta perguruan tinggi. Pengawas sekolah sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan memiliki peran penting untuk melakukan kontrol dan evaluasi. Perguruan tinggi penting dalam peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan, baik yang terkait dengan bidang ilmu yang diajarkan maupun media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar.

Hal-hal tersebut juga sangat ditentukan oleh visi dan misi bupati yang dijabarkan dalam berbagai kebijakan dan peraturan oleh pemangku kepentingan lain seperti Dinas Pendidikan, Bappeda, maupun DPRD. Prioritas program dan alokasi anggaran akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para guru untuk peningkatan kualitas. Selain itu, media pembelajaran ditentukan oleh penentu kebijakan ini.

## LAMPIRAN 7

**Tabel A3. Matriks Metode Komunikasi**

Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
Bappeda	Kabid Sosial Budaya	Komunikasi tidak langsung (suara)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telepon</li> <li>- Radio Pemerintah Daerah (RPD)</li> </ul>	-	RPD berada di bawah Kemkominfo, tetapi beritanya dari humas Setda Sumbawa (berita seputar kegiatan bupati dan pembangunan)
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SMS</li> <li>- Surel (untuk berbagi data atau mengirim undangan/informasi)</li> <li>- Surat edaran (satu arah)</li> <li>- Koran (media cetak)</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status Facebook biasanya dibaca dan dikomentari oleh pemangku kepentingan terkait</li> <li>- Berlangganan media cetak (koran lokal) untuk mendapatkan informasi</li> </ul>
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facebook</li> <li>- WhatsApp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperbarui status di Facebook yang berisi informasi terkait pembangunan daerah</li> <li>- Grup WhatsApp (Bappeda) yang anggotanya terdiri atas staf Bappeda, Dinas Pendidikan, DPRD, Perpustakaan Daerah, dan para pimpinan SKPD lainnya;</li> <li>- Group WhatsApp (Sahabat)</li> <li>- Anggotanya: SKPD Sumbawa, camat, masyarakat, SKPD kabupaten lain;</li> </ul>	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat</li> <li>- Berbagi data yang mencakup data resmi dari BPS, UPTD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial (<i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat-rapat koordinasi</li> <li>- Kunjungan meminta/mengantar data</li> <li>- Musrenbang: kabupaten dan kecamatan (peserta paling banyak berasal dari kalangan pendidik: UPTD, pengawas, guru)</li> </ul>	-

Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
Dinas Pendidikan		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	- FIG - MGMP - Jurnal Pendidikan Samawa–ber-ISSN	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	- SMS - Surel - Surat edaran (satu arah) - Koran (media cetak)	- FIG - MGMP - Jurnal Pendidikan Samawa–ber-ISSN - Media cetak yang menjadi mitra Dinas Pendidikan untuk menyampaikan berita terkait pendidikan - Milis Jurnal Pendidikan Samawa	Surel digunakan untuk mengirim undangan/surat edaran dinas, menerima undangan dinas, dan mengirim draf tulisan untuk Jurnal Pendidikan Samawa
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	- Facebook - WhatsApp	- Grup WhatsApp (MGMP) - Grup WhatsApp (FIG) - Grup WhatsApp (Bappeda) - Grup WhatsApp (Sahabat) - Grup WhatsApp (Nusantara) - Akun Facebook resmi Dinas Pendidikan	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Rapat	- Rapat-rapat koordinasi - FIG - MGMP - Journal Pendidikan Samawa (PTK)–ber-ISSN	-
DPRD	Anggota Komisi IV	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	- SMS - Surat keputusan DPRD (satu arah)	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	WhatsApp	Berbagai grup WhatsApp (sebagian beririsan dengan Dinas Pendidikan dan Bappeda)	-

Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Rapat	- Rapat-rapat DPRD (komisi, paripurna, dan lainnya) - Dengar pendapat berdasarkan laporan yang masuk dari masyarakat (DPRD akan memanggil dinas terkait)	-
Dewan Pendidikan		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	- Berkirim surat (wajib) - SMS	-	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Tatap muka	Kerja sama dengan beberapa komite sekolah	-
PGRI		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	- SMS - Surel	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	- WhatsApp - Facebook - Internet	-	Informan juga memiliki akun Instagram, tetapi hanya untuk kepentingan pribadi
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Rapat	Rapat koordinasi dengan atas dan bawah (mulai dari PGRI nasional hingga kecamatan)	-
Ormas: Nahdlatul Wathan	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	- SMS - Surel - Buku (menulis di buku, artikel, atau pun jurnal)	Karya tulis informan di buku atau terbitan tertulis lain seperti jurnal (salah satunya adalah menjadi pengulas untuk Jurnal Pendidikan Samawa)	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	- WhatsApp - Facebook	Berbagai group WhatsApp	-

Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
			- Internet		
		Komunikasi langsung (tatap muka)	- Rapat - Seminar (menjadi peserta atau pun menjadi narasumber)	-	Membagi/mendapat informasi/pengetahuan dalam seminar
Media (Gaung NTB)	Redaktur	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	- Laporan dari wartawan atau koresponden - Laporan dari masyarakat (ke nomor telepon yang telah disediakan)	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	- SMS - Media cetak (koran)	- Laporan dari wartawan atau koresponden - Laporan dari masyarakat (ke nomor telepon yang telah disediakan) - Menyampaikan berita di koran Gaung NTB	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	- Facebook - Situs web	Menyampaikan berita di situs web	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	- Liputan langsung - Menempatkan wartawan di Dinas Pendidikan	Laporan dari wartawan atau koresponden	-
Ornop: Lembaga Psikologi Pelangi Harapan	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	- SMS - Surat	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	- Mencetak buku - Membuat video (CD)	Buku dan video (CD) tentang kegiatan mengajar joki anak-anak	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Tatap muka langsung	- Mengajar anak-anak yang menjadi joki anak-anak	-

Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi narasumber: seminar, presentasi</li> <li>- Memberi pelatihan</li> </ul>	
UPTD TK SD Kecamatan Lopok	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Tatap muka langsung di rapat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan koordinasi di kecamatan (rutin): kecamatan, desa, pengawas sekolah, komite sekolah, sekolah</li> <li>- Rapat komite sekolah</li> <li>- Rapat bulanan dengan sekolah-sekolah di wilayahnya</li> <li>- Rapat-rapat koordinasi dengan SKPD terkait</li> </ul>	-
UPTD TK SD Kecamatan Lape		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Tatap muka langsung di rapat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan koordinasi di kecamatan (rutin): kecamatan, desa, pengawas sekolah, komite sekolah, sekolah</li> <li>- Rapat komite sekolah</li> <li>- Rapat bulanan dengan sekolah-sekolah di wilayahnya</li> <li>- Rapat-rapat koordinasi dengan SKPD terkait</li> </ul>	-
Pengawas sekolah SMP A		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	SMS	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	WhatsApp	- Grup WhatsApp pengawas	-

Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
				- Grup WhatsApp pengawas dengan sekolah binaan	
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Rapat	- Rapat MKPS dua kali dalam setahun	-
Pengawas sekolah SMP B	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	SMS	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	WhatsApp	- Berbagai grup WhatsApp (MGMP PKN Nusantara, pengawas sekolah) - Berbagai informasi yang terkait dengan tugas pengawas sekolah yang dikelola oleh operator di kantor pengawas sekolah dan dikirim ke semua pengawas sekolah	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	- Rapat - Kunjungan langsung ke sekolah-sekolah	- MGMP PKN Sumbawa - Rapat pengawas sekolah - Kunjungan di sekolah dan <i>sit-in</i> di kelas	-
Pengawas sekolah Kuris	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	- Tatap muka langsung di rapat - Kunjungan langsung ke sekolah-sekolah	- Rapat koordinasi semua kepala sekolah di rumah informan - Kunjungan di sekolah dan <i>sit-in</i> di kelas - Rapat pengawas sekolah	-
Pengawas sekolah Lopok	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	- SMS - Surel	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	Internet	-	Mencari informasi di internet

Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
		Komunikasi langsung (tatap muka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tatap muka langsung di rapat</li> <li>- Kunjungan langsung ke sekolah-sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi semua kepala sekolah di rumah informan</li> <li>- Kunjungan di sekolah dan <i>sit-in</i> di kelas</li> <li>- Rapat pengawas sekolah</li> </ul>	-
Kepala sekolah SMP B	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SMS</li> <li>- Surel</li> </ul>	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	Facebook	-	Punya akun Facebook untuk keperluan pribadi, bukan untuk pekerjaan
		Komunikasi langsung (tatap muka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan rumah</li> <li>- Rapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan kunjungan rumah dilakukan melalui guru BK</li> <li>- Rapat komite sekolah dua kali setahun</li> <li>- Rapat koordinasi ke atas dan ke bawah</li> <li>- Rapat internal sekolah</li> </ul>	-
Wakil kepala sekolah SMP A	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	SMS	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	WhatsApp	Berbagai grup WhatsApp (MGMP PKN Sumbawa, MGMP PKN Nusantara)	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Rapat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MGMP PKN Sumbawa</li> <li>- MGMP PKN Nusantara</li> </ul>	-
Kepala sekolah SD B	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	SMS	-	-

Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
		Komunikasi langsung (tatap muka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat</li> <li>- Kunjungan rumah</li> <li>- Bertemu langsung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertemuan kepala sekolah (dalam satu gugus)</li> <li>- Kunjungan ke rumah anak-anak yang bermasalah</li> <li>- Bertemu dan menjalin komunikasi dengan orang tua murid, komite sekolah, kepala dusun, dan tokoh masyarakat setempat</li> </ul>	-
Kepala sekolah SD A	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	SMS	-	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Rapat	Rapat KKG (sebagai sekolah inti dan ketua gugus)	-
Kelompok guru SMP B	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SMS</li> <li>- Surel</li> </ul>	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WhatsApp</li> <li>- Facebook</li> </ul>	Berbagai grup WhatsApp (guru Matematika bahkan ikut dalam grup WhatsApp lintas jenjang kelas)	Selain sudah memanfaatkan WhatsApp dan Facebook, sebagian guru sudah memanfaatkan IMO dan Instagram untuk keperluan pribadi
		Komunikasi langsung (tatap muka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat</li> <li>- Kunjungan rumah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan rumah oleh guru BK</li> <li>- Rapat guru</li> <li>- Pertemuan MGMP</li> <li>- Pelatihan guru</li> </ul>	-
Kelompok guru SMP A	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-

Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	- SMS - Surel	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	- WhatsApp - Facebook - Internet	- Berbagai grup WhatsApp (grup MGMP dan grup Bahasa Inggris) - Internet	Ada guru yang mengikuti pelatihan yang disponsori oleh negara Brunei Darussalam berkat informasi yang didapatkannya dari Facebook
		Komunikasi langsung (tatap muka)	- Rapat - Kunjungan rumah	- Kunjungan rumah oleh guru BK - Rapat guru - Pertemuan MGMP - Pelatihan guru	-
Kelompok guru SD B	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	- SMS - Surel	-	- Pengiriman surel dilakukan dengan menumpang ke sekolah lain yang telah terjangkau jaringan internet
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	- WhatsApp - Facebook	-	- WhatsApp dan Facebook hanya dilakukan di luar jam sekolah karena ketiadaan akses internet di sekolah
		Komunikasi langsung (tatap muka)	- Rapat - Kunjungan rumah	KKG	-
Kelompok guru SD A	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	- SMS - Surel - Surat	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	Facebook	-	-

Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
		Komunikasi langsung (tatap muka)	- Rapat - Kunjungan rumah	KKG	-
Komite sekolah SMP B	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	SMS	-	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Rapat	Rapat pengurus komite sekolah	-
Komite sekolah SMP A	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	- SMS - Surat	-	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Rapat	- Rapat dengan orang tua murid - Rapat komite sekolah	-
Komite sekolah SD B (sudah tidak aktif selama tiga tahun, tetapi jika ada keperluan mendadak, pengurus yang akan menanganinya)	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	SMS	-	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Rapat	- Koordinasi komite sekolah dengan kepala sekolah	-

Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
					- Karena komite sekolah tidak aktif, orang tua juga menjadi tidak aktif, bahkan rapor diambil sendiri oleh anaknya
Komite sekolah SD A	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	SMS	-	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	- Rapat - Kunjungan ke murid - Surat	- Rapat komite sekolah - Kunjungan ke murid dilakukan melalui kelompok belajar masing-masing dusun yang dibentuk untuk memastikan kegiatan belajar kelompok berjalan di dusunnya  - Koordinasi pembangunan fisik sekolah dilakukan oleh komite sekolah per dusun	Ruang komite sekolah yang disediakan oleh sekolah
Kelompok murid laki-laki SMP A	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	SMS	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	Tidak semua memiliki telepon genggam dan laptop. Bagi yang memiliki, telepon genggam dan laptop dipakai untuk mengakses Facebook dan internet	Menggunakan internet untuk mencari bahan pelajaran (dengan memanfaatkan mesin pencari seperti Google)	Selain untuk mendukung murid mencari bahan pelajaran, internet digunakan untuk pergaulan
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Bertemu langsung	Kelompok belajar	-
Kelompok murid perempuan SMP A	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-

Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	SMS	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	Tidak semua memiliki telepon genggam dan laptop. Bagi yang memiliki, telepon genggam dan laptop dipakai untuk mengakses Facebook dan internet	Menggunakan internet untuk mencari bahan pelajaran (dengan memanfaatkan mesin pencari seperti Google)	Selain untuk mendukung murid mencari bahan pelajaran, internet digunakan untuk pergaulan
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Bertemu langsung	Kelompok belajar	-
Kelompok murid laki-laki SMP A	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	SMS	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	Tidak semua memiliki telepon genggam dan laptop. Bagi yang memiliki, telepon genggam dan laptop dipakai untuk mengakses Facebook, Twitter, dan situs jual beli daring	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan internet untuk mencari bahan pelajaran (dengan memanfaatkan mesin pencari seperti Google)</li> <li>- Ada murid yang memanfaatkan keberadaan situs jual beli daring untuk menjual dagangannya</li> </ul>	Selain untuk mendukung murid mencari bahan pelajaran, internet digunakan untuk pergaulan
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Bertemu langsung	Kelompok belajar	-
Kelompok murid perempuan SMP A	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	-	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	-	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	- Beberapa tidak punya telepon genggam, tetapi	-	-

Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
			sebagian besar punya telepon genggam - Bagi yang punya, telepon genggam digunakan untuk mengakses Facebook		
Kelompok murid laki-laki SD B	-		- Hanya sedikit yang memiliki telepon genggam - Daerah Kuris tidak terjangkau jaringan internet yang baik	-	-
Kelompok murid perempuan SD B	-		- Hanya sedikit yang memiliki telepon genggam - Daerah Kuris tidak terjangkau jaringan internet yang baik	-	-
Kelompok murid laki-laki SD A	-	Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	- Tidak semua punya telepon genggam - Ada salah satu anak yang memiliki telepon genggam yang sering ia pakai untuk mengakses Facebook	-	-
Kelompok murid perempuan SD A	-		Belum banyak yang memiliki alat komunikasi maupun menggunakannya untuk mengakses media sosial	-	-
Kelompok orang tua SMP B	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	SMS	-	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Bertemu langsung	Rapat komite sekolah	Tidak semua orang tua ikut rapat komite sekolah

Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Tipe Media Komunikasi	Saluran Komunikasi	Saluran Keterlibatan	Keterangan
Kelompok orang tua SMP A	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	SMS	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan, gambar)	Menggunakan internet untuk mengakses mesin pencari menggunakan search engine	Mencari bahan pelajaran bersama anak, dengan menggunakan Google	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Bertemu langsung	Rapat komite sekolah	Tidak semua orang tua ikut rapat komite sekolah
Kelompok orang tua SD B	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	SMS	-	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Bertemu langsung	Datang langsung ke sekolah (mengadu ke sekolah) jika ada masalah karena komite sekolah tidak aktif	Komite sekolah sudah vakum selama tiga tahun ini
Kelompok orang tua SD A	-	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	-	-
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	- SMS - Surat	-	-
		Komunikasi langsung (tatap muka)	Bertemu langsung	Rapat komite sekolah	-

## LAMPIRAN 8

### Analisis Pohon Masalah

Permasalahan rendahnya hasil pembelajaran di Kabupaten Sumbawa berakar pada tiga masalah utama, yaitu

- a) permasalahan guru,
- b) permasalahan rendahnya dukungan orang tua, dan
- c) kurangnya sarana dan prasarana sekolah.

#### Permasalahan Guru

- a) Distribusi guru bukan hanya menyangkut soal kuantitas tetapi juga kualitas guru. Perlindungan dan kesejahteraan guru juga bisa memengaruhi kualitas guru.
- b) Persoalan kesejahteraan itu hanya dialami oleh guru honorer, sedangkan kesejahteraan guru PNS sudah baik. Kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan bagi guru di wilayah terpencil terbatas.
- c) Perlindungan terhadap guru hanya ditemukan di beberapa tempat.
- d) Permasalahan guru meliputi jumlah guru, distribusi guru, kualitas guru, dan metode mengajar. Hal ini disepakati oleh semua peserta FGD.
- e) Jumlah dan distribusi guru dipengaruhi oleh penempatan guru. Peserta FGD setuju bahwa jumlah guru dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti guru pensiun dan tidak bisa diangkatnya guru honorer menjadi PNS. Pengangkatan guru sifatnya terpusat. Namun, peserta meralat kata-kata “dukungan kepala sekolah” dalam jawaban mereka menjadi “kepala sekolah tidak berani mengangkat guru untuk menutupi kekurangan”. Hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya dukungan masyarakat melalui komite sekolah untuk menyediakan anggaran untuk guru.
- f) Rasio ideal guru dan rombel adalah 1:1; satu guru untuk satu rombel. Untuk Sumbawa, guru PNS dan non-PNS sudah memenuhi syarat rasio. Akan tetapi, saat membicarakan lokasi tertentu, yaitu daerah 3T, sekolah yang dibangun hanya sedikit siswanya sehingga rasio 1 rombel berbanding 1 guru tidak terpenuhi.
- g) Penempatan guru di daerah 3T lebih memengaruhi distribusi guru karena jumlah guru PNS dan non-PNS sudah terpenuhi.
- h) Dari sisi siswa berkebutuhan khusus, guru yang sudah ada belum bisa mengakomodasi mereka.
- i) Kalau guru non-PNS diberhentikan, Sumbawa akan kekurangan guru pendidikan dasar.

Penyebab bagan ke-3 bawah (jumlah guru):

- (1) GTT tidak mengajar penuh waktu. Menurut peserta FGD, lebih tepat jika menyebut guru GTT justru mengajar penuh waktu. GTT hanya mengejar prasyarat kuliah. GTT melakukan tugas di luar kependidikan. Gaji GTT kecil karena hanya mengandalkan anggaran BOS.
  - (2) Sekolah inklusi belum mendapat perhatian cukup.
- j) Distribusi guru dipengaruhi oleh kondisi daerah 3T. Peserta FGD menambahkan faktor kemauan politik. Mereka juga menambahkan faktor perlindungan dan kesejahteraan (risiko bekerja di daerah terpencil lebih besar dibandingkan di daerah perkotaan). Biaya hidup di daerah 3T lebih besar. Fasilitas penunjang di daerah 3T kurang. Tambahan lainnya adalah bahwa latar belakang pendidikan guru memengaruhi distribusi guru.

Penyebab bagan ke-3 bawah (distribusi guru):

- (1) Senioritas (guru senior lebih terkonsentrasi di tempat tertentu saja)
- (2) Beban kerja: beban administrasi, guru sekolah inklusi memiliki beban ganda mengajar siswa biasa dan siswa berkebutuhan khusus, lokasi daerah 3T

- k) Kualitas guru dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Pengetahuan guru masih rendah untuk menangani siswa berkebutuhan khusus. Pengalaman mengajar pun masih kurang. Kebijakan kurikulum pun berubah-ubah. Peserta lain berpendapat bahwa jika guru berkualitas, mereka akan mampu mengikuti perubahan kurikulum. Jadi, faktor perubahan kurikulum kurang signifikan. Faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas guru terkait dengan kurikulum adalah kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum yang berlaku. Kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum rendah. Selain itu, mereka tidak/kurang bisa memakai alat peraga. Kemudian peserta berpendapat bahwa partisipasi/kehadiran guru tidak maksimal. Selain itu, faktor yang memengaruhi kualitas guru adalah ketersediaan sarana dan prasarana.

Penyebab bagan ke-3 bawah (kualitas guru):

- (1) RPP *copy paste*
- (2) Waktu/jadwal pelatihan terbatas
- (3) GTT melakukan hal lain di luar jam mengajar
- (4) Kualitas akademik tidak terjamin
- (5) Beban mengajar terlalu tinggi (sekolah inklusi)
- (6) Pekerjaan lain di luar jam mengajar
- (7) Beban kerja (di lingkungan sekolah)
- (8) Sekolah inklusi belum mendapat perhatian cukup
- (9) GTT hanya mengejar prasyarat kuliah
- (10) Metode guru mengajar dipengaruhi oleh kreativitas, sikap terbuka, konsentrasi guru, status kepegawaian (non-PNS cenderung tidak berkonsentrasi karena persoalan kesejahteraan), dan penguasaan teknologi. Peserta menambahkan faktor kompetensi guru.

### Dukungan Orang Tua

- a) Kemampuan membimbing anak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua (orang tua hanya tamat SD), status ekonomi (lingkaran kemiskinan yang memaksa anak untuk bekerja), dan kurangnya kesadaran orang tua untuk membimbing anaknya.
- b) Orang tua sepenuhnya menyerahkan pendidikan anaknya ke sekolah. Hal ini karena orang tua tidak punya motivasi untuk mendukung pembelajaran anak.
- c) Kehadiran orang tua untuk membimbing anaknya dalam belajar dipengaruhi oleh musim panen (pada saat panen atau melaut, orang tua mengajak anak mereka sehingga anak membolos) dan orang tua yang menjadi buruh migran (ketidakhadiran orang tua dalam waktu cukup panjang).
- d) Pelibatan orang tua masih sebatas permintaan materi belajar untuk anak. Komunikasi sekolah dengan orang tua juga terbatas. Pelibatan orang tua di komite sekolah rendah.
- e) Adanya faktor lingkungan yang berpengaruh.

### Sarana dan Prasarana

- a) Infrastruktur fisik sekolah (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, toilet, daya tampung) dipengaruhi oleh anggaran. Fasilitas tersedia, tetapi kondisi kurang terawat (sumber dana, faktor kebiasaan). Rasio ruang kelas dan siswa sudah ideal, tetapi rasio ruang kelas dan rombel masih kurang. Persoalannya adalah distribusi. Masalah kekurangan ruang kelas terjadi di sekolah-sekolah di kota. Kondisi geografis juga memengaruhi ketersediaan ruang kelas.

- b) Ketersediaan buku: ada dana BOS, tetapi akses untuk membeli buku teks kurang. Ada mafia perbukuan di pusat. Dipengaruhi juga oleh pergantian kurikulum (butuh buku baru). Namun, untuk Kurikulum 2013, bukunya disiapkan terlebih dahulu. Pada 2006, kurikulum diberlakukan dulu dan baru bukunya disiapkan belakangan.
- c) Teknologi informasi: apakah memengaruhi kualitas pembelajaran? Akses ke koneksi teknologi informasi dipengaruhi faktor geografis (beberapa tempat tidak terjangkau jaringan). Penguasaan teknologi informasi juga masih kurang karena beberapa faktor, yaitu SDM yang kurang menguasai teknologi informasi, kurangnya pendidikan dan pelatihan terkait dengan teknologi informasi, kurang meratanya distribusi fasilitas teknologi informasi, dan kurangnya kemauan untuk belajar tentang teknologi informasi.
- d) Alat peraga kurang karena anggaran terbatas dan belum ada komitmen untuk menganggarkan dana untuk menyiapkan TIK.
- e) Fasilitas sekolah inklusif belum memadai: semua peserta FGD setuju dan tidak ada perdebatan tentang fasilitas di sekolah inklusif ini.



## LAMPIRAN 9

**Tabel A4. Analisis Penyelesaian Masalah**

Pihak yang Berwenang	Dukungan yang Diperlukan	Kapabilitas	
		Yang Tersedia	Yang Dibutuhkan
Guru (termasuk pengawas sekolah, MGMP, KKG, forum guru)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaharui metode dan peningkatan kreativitas mengajar</li> <li>Kedisiplinan dan kehadiran di kelas</li> <li>Kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu</li> <li>Kontinuitas dan frekuensi pertemuan semua jenis forum guru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guru yang sesuai kualifikasi sudah tersedia</li> <li>Tunjangan sertifikasi ada, mestinya guru sudah makin profesional</li> <li>Latar belakang perguruan tinggi dan IPK yang beragam</li> <li>MGMP/KKG sudah ada, tetapi belum aktif berkegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen</li> <li>Kreativitas guru dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada</li> <li>Pendidikan karakter bagi guru</li> <li>Interaksi guru dengan murid yang menyenangkan</li> <li>Pengaturan jadwal yang tidak mengganggu waktu belajar</li> <li>Kontinuitas</li> <li>Wadah dan hasil, misalnya jurnal</li> </ul>
Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data guru (jumlah, distribusi, kualifikasi, status kepegawaian)</li> <li>Pemerataan guru</li> <li>Pelatihan (jenis pelatihan yang bervariasi, SDM pelatih harus bagus, jumlah pelatihan memadai)</li> <li>Peningkatan kualifikasi guru</li> <li>Peningkatan status GTT</li> <li>Metode pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distribusi guru terkonsentrasi di kota</li> <li>Insentif guru di lokasi terpencil</li> <li>Pelatihan ada, tetapi terbatas</li> <li>Rasio pengawas sekolah dan sekolah rendah karena lokasi sekolah tersebar dan sulit diakses</li> <li>Metode mengajar masih monoton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi antarbidang dan antarseksi yang terkait dengan pembelajaran</li> <li>Meningkatkan kesempatan SDM lokal</li> <li>Pelatih berkualitas dari luar Sumbawa</li> <li>Komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait</li> </ul>
Komite sekolah	Dorongan dan bimbingan orang tua bagi anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkoordinasi orang tua siswa</li> <li>Mediator antara sekolah dan orang tua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keaktifan komite sekolah</li> <li>Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif</li> </ul>
DPRD	Advokasi terkait alokasi anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Advokasi masih terbatas</li> <li>Fungsi penganggaran</li> <li>Fungsi pengawasan eksekutif</li> <li>Hak inisiatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Advokasi menyeluruh</li> <li>Komitmen</li> <li>Peraturan-peraturan terkait pendidikan</li> </ul>

Pihak yang Berwenang	Dukungan yang Diperlukan	Kapasitas	
		Yang Tersedia	Yang Dibutuhkan
Bupati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan dan komitmen politik</li> <li>Koordinasi lintas sektoral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan menjadi prioritas pertama dalam RPJMD</li> <li>Wewenang penuh bupati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi</li> <li>Penyerderhanaan komunikasi karena selama ini terlalu banyak yang terlibat</li> </ul>
Kemendikbud	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan kesiapan memakai kurikulum baru</li> <li>Bahan penunjang pembelajaran (buku, bahan ajar)</li> <li>Sosialisasi kebijakan</li> <li>Dukungan anggaran (BOS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah dimulai, tetapi pelatihan, buku, bahan ajar, dan sosialisasi belum mencukupi</li> <li>Dana dampingan dari BOSDA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu pelatih profesional</li> <li>Materi yang mudah digunakan</li> <li>Koordinasi antarsektor</li> <li>Jumlah dana yang lebih besar</li> <li>Administrasi yang lebih ringan</li> </ul>

**Catatan hasil kesepakatan dan respons penting dari peserta FGD terhadap pemetaan ‘analisis penyelesaian masalah awal’:**

**GURU**

- latar belakang perguruan tinggi dan nilai IPK
- tunjangan sertifikasi semestinya membuat guru profesional

**FORUM GURU**

Forum-forum guru ada, tetapi kurang aktif. Perlu ditingkatkan.

**PENGAWAS SEKOLAH**

Rasio pengawas sekolah dan sekolah tidak masalah, tetapi kompetensi pengawas sekolah dan guru tidak sesuai. Itulah pentingnya peningkatan kapasitas bagi pengawas sekolah. Bila perlu, pengawas sekolah dikuliahkan ke jenjang S-2.

**DPRD**

Hak penganggaran diganti dengan fungsi penganggaran

**BUPATI**

Terlalu banyak yang terlibat (kolom “Kapasitas yang Dibutuhkan”)

**Kemendikbud:**

Kelulusan merupakan momok bagi sekolah. Dulu, ujian nasional sangat menakutkan bagi sekolah karena merupakan syarat kelulusan murid yang ditentukan Pemerintah Pusat. Sekarang, sekolahlah yang menentukan kelulusan murid. Persoalannya sekarang bagaimana menaikkan nilai kelulusan.

## LAMPIRAN 10

Tabel A5. Basis Data Inovasi Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa, 2005–2016

Kebijakan/ Inovasi Utama	Lembaga/Tokoh				Praktik Pelaksanaan				Dampak Kebijakan/Inovasi			Pelajaran yang Dipetik		
	Penggagas	Agen Pembaruan	Pelaksana	Peran Lembaga Informan	Mekanisme	Pembiayaan	Modifikasi	Ham-batan	Alasan Berhasil/Tidak	Kondisi Pendidikan Umum	Kualitas Pembelajaran	Bagi Pelaku	Pembelajaran dari Kebijakan/Inovasi	Usulan Peningkatan Kualitas Pembelajaran
BOSDA	Dinas Dikpora Provinsi (BOSDA provinsi) dan Dinas Diknas (BOSDA kabupaten)	Dinas Diknas (bidang dikdas)	Sekolah	Pelaksana	Sebagai komplemen Program BOS dari pusat	APBD provinsi dan APBD kabupaten	APBD provinsi baru mulai, APBD kabupaten untuk alat tulis kantor	Distribusi dana untuk daerah terpencil	Dana yang dianggarkan kecil, antara 1,6 juta–1,7 juta rupiah per sekolah per tahun	Belum dianalisis oleh Dinas Diknas	Bersifat menunjang pembelajaran. Ada juara O2SN dan OSN, tetapi belum tentu dari program BOSDA	Membantu sekolah. Berdampak bagi siswa dari orang tua miskin. Pakaian murid jadi lebih baik dan ketidakhadiran murid berkurang	Perlu ada beberapa pilihan penggunaan anggaran	Peningkatan anggaran dan penggunaan yang lebih luas
Peningkatan Kapasitas MGMP & KKG	Bidang PMPTK Dinas Diknas	Bidang PMPTK Dinas Diknas	Swadaya MGMP dan KKG	Dinas Diknas	Satu kelompok MGMP atau KKG terdiri atas 8–10 sekolah	Swadaya	Merupakan modifikasi dari MGMP/KKG dari pusat yang dimodifikasi daerah	MGMP bersifat swadaya dan ada keterbatasan anggaran. Di lain pihak, jumlah kelompok guru dan guru terbatas	Belum terlihat; ada MGMP yang tidak aktif. KKG tetap berjalan secara rutin	Belum ada evaluasi	Dengan adanya berbagi pengalaman antarguru mata pelajaran, kualitas pembelajaran diharapkan meningkat	Ada wadah untuk berbagi pengalaman antarguru mata pelajaran. MGMP ada yang tidak jalan, tetapi KKG rutin berjalan	Pertukaran informasi di antara guru mata pelajaran yang sama	Jika difasilitasi dan dikoordinasi ,Dinas Diknas, MGMP dan KKG dapat berjalan
Jurnal Pendidikan Samawa	Jurnal Cendekia: ada pengelola lintas seksi. Sekretariatnya di Subbagian Program	Jurnal Pendidikan Samawa di Seksi Kurikulum	Jurnal Pendidikan Samawa di Seksi Kurikulum dan guru-guru sebagai penulis	Fasilitator bagi guru-guru	Diadakan lokakarya, guru-guru membawa judul tulisan atau 20% tulisan. Kemudian, guru-guru diberi	Bantuan dari Dinas Diknas sebesar 25 juta rupiah untuk penyusunan jurnal. Guru yang menulis ditarik Rp200 ribu dan	Dari FIG. Juga sebagai penghidupan kembali jurnal yang pernah terbit, yaitu Jurnal Cendekia	Penerbitan cukup lama	Sudah terbit jurnal edisi perdana. Edisi kedua sudah dalam bentuk draf	Peningkatan kualitas guru melalui menulis karya ilmiah yang sesuai dengan bidang	Perubahan pola pikir guru sehingga pembelajaran bidang studi lebih kaya bahan studinya	Peningkatan kualitas guru dalam menulis untuk menambah angka kredit guru	Sebagai wadah karya ilmiah bagi guru untuk mengekspresikan pemikiran, khususnya terkait dengan bidang studinya	Perlu pelatihan menulis karya ilmiah bagi guru-guru, baik pendalaman maupun cakupan guru-guru yang dapat dilatih

Kebijakan/ Inovasi Utama	Lembaga/Tokoh				Praktik Pelaksanaan				Dampak Kebijakan/Inovasi			Pelajaran yang Dipetik		
	Penggagas	Agen Pemb- aruan	Pelaksana	Peran Lembaga Informan	Mekanisme	Pembiayaan	Modifikasi	Hambatan	Alasan Berhasil/ Tidak	Kondisi Pendidikan Umum	Kualitas Pembelajaran	Bagi Pelaku	Pembelajaran dari Kebijakan/ Inovasi	Usulan Peningkatan Kualitas Pembelajaran
	Jurnal Pendidikan Samawa di Seksi Kurikulum dengan mengundang pengulas dari luar Dinas Diknas				pelatihan menulis	memperoleh satu eksemplar jurnal				studinya sehingga pembelajaran bidang studi tersebut ada peningkatan				
FIG	Dinas Diknas dan FIG, Asisten I Daerah	Dinas Diknas dan FIG	Dinas Diknas dan FIG	Salah satu inisiator	Proses belajar seperti apa, masalahnya apa, lalu dituangkan ke dalam tulisan ilmiah	Swadaya guru		Waktu mengajar guru yang terbatas	Munculnya Jurnal SAMAWA edisi I, dan saat ini sudah ada draf edisi II	Motivasi guru untuk menulis secara ilmiah, mendorong perkembangan MGMP	Peningkatan kualitas guru-guru, perubahan pola pikir guru	Semangat guru-guru untuk melakukan perubahan	Perlu dorongan bagi guru untuk berpikir dan menulis secara ilmiah	Kesempatan bagi guru untuk menulis secara ilmiah sesuai dengan bidang studinya
Sekolah Komunitas	Dosen-dosen Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)	Lembaga Psikologi Pelangi Harapan (LPPH)	Lembaga Psikologi Pelangi Harapan (LPPH)	Pelaksana	Ada 50 joki anak-anak yang mengikuti dari tahap satu hingga tahap tiga. Saat mereka tanding, dicek pembelajaran mereka. Pembelajaran dilakukan di tenda dekat arena joki.		Murni LPPH	Awalnya ada penolakan dari joki sendiri dan orang tua mereka	Lebih kepada sikap joki dari mulanya liar menjadi lebih sopan	Belum dicek ke sekolah dampaknya terhadap pembelajaran	Meninggalan sekolah hingga dua minggu sehingga perlu ada pendampingan	Perubahan perilaku joki dari liar menjadi sopan seperti memberi salam dan sholat tepat waktu	Mendidik anak-anak yang biasa bergaul dengan orang dewasa agar tidak liar	Dengan berperilaku sopan dan mau belajar, diharapkan meningkatkan hasil pembelajarannya bagi joki
Insentif Guru di Daerah Terpencil	Diskusi para pemangku kepentingan pendidikan di Sumbawa	Dinas Diknas	Dinas Diknas	Pelaksana	Berdasarkan diskusi sektor terkait dengan Dinas Diknas. Sasarannya adalah guru-guru di daerah terpencil	APBD	Berdasarkan hasil diskusi sektor pendidikan	Jangkauannya relatif lebih sulit. Penentuan		Belum ada pemantauan	Belum dilakukan pemantauan	Pemerataan kesejahteraan bagi guru	Ada insentif atau perhatian bagi guru di daerah terpencil	Perlu ada pemantauan hasil pembelajaran di daerah terpencil

Kebijakan/ Inovasi Utama	Lembaga/Tokoh			Praktik Pelaksanaan					Dampak Kebijakan/Inovasi			Pelajaran yang Dipetik		
	Penggagas	Agen Pem- baruan	Pelaksana	Peran Lembaga Informan	Mekanisme	Pembiayaan	Modifikasi	Hambatan	Alasan Berhasil/ Tidak	Kondisi Pendid- kan Umum	Kualitas Pembela- jaran	Bagi Pelaku	Pembelajaran dari Kebijakan/ Inovasi	Usulan Peningkatan Kualitas Pembelajaran
								terpencil berdasar- kan alat transpor- tasi yang diguna- kan dan alat pene- rangan						
Insentif Guru Madrasah	Diskusi para pemangku kepentingan pendidikan di Sumbawa		Dinas Diknas dan Kementerian Agama dengan sasaran guru madrasah	Pelaksana adalah Dinas Diknas dan Kemenag		Murni gagasan Kabupaten Sumbawa, APBD Sumbawa	Merupakan pindahan dari program Kesra					Peningkatan kesejahteraan guru honorer madrasah (MI, MTs, MA)	Peningkatan kesejahteraan dan mengurangi ego sektoral	Peningkatan kesejahteraan untuk meningkatkan motivasi mengajar
Komite Sekolah per Dusun	Komite sekolah dan pihak sekolah SMP A	Komite Sekolah SMP A	Pengurus dan anggota komite sekolah SMP A	Pengurus komite sekolah tersebar di setiap dusun	Setiap anggota/pengurus komite memantau atau memastikan kelompok belajar berjalan baik	Komite sekolah	Gagasan komite sekolah dan pihak sekolah		Belajar kelompok berjalan baik. Terdapat murid dari dusun jauh yang mengikuti OSN		Belum bisa dipastikan dari kebijakan ini, tetapi diperoleh beberapa anak yang berprestasi	Komite sekolah dapat memantau belajar kelompok murid yang ada di dusun masing-masing. Perwakilan pengurus/anggota komite yang merata di setiap dusun		
Jurnal Cendekia (lihat juga inovasi nomor 3)	Dinas Diknas dengan melibatkan seksi terkait (koordinator: Bidang PMPTK)	Dinas Diknas dengan melibatkan seksi terkait (koordinator: Bidang PMPTK)	Dinas Diknas dengan melibatkan seksi terkait (koordinator: Bidang PMPTK)	Koordinator bagi guru-guru yang akan menulis	Sekretariat dan lintas bidang untuk guru sekabupaten. Hasil kegiatan guru dan siswa dipublikasikan	Awalnya dari APBD, kemudian swadaya sekolah yang membiayai	Sebagai kelanjutan atau modifikasi dari Program BERMUTU	Hanya berlangsung pada 2011–2012 karena kesulitan dana swadaya sekolah	Sebagai sarana pengembangan guru dalam menulis secara ilmiah	Peningkatan guru dalam menulis	Guru lebih mendalami mata pelajaran yang diajarkan	Sarana pengembangan guru	Sebagai wadah guru untuk menulis secara ilmiah	Perlu ada konsistensi dan dukungan dana dari pemerintah kabupaten

## LAMPIRAN 11

**Tabel A6. Daftar Perolehan Data Sekunder**

Soft Copy			
No.	Nama Folder	Nama File	Jenis
1	Data PTK	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bentuk pendidikan</li> <li>b. Data tenaga honorer sekolah</li> <li>c. Data tenaga honorer sekolah</li> <li>d. Data guru honor sekolah SMP</li> <li>e. Data guru SD Gol Ila</li> <li>f. Data guru SD</li> <li>g. Data guru SMP Gol Ila</li> <li>h. Data guru SMP</li> <li>i. Guru mata pelajaran SD</li> <li>j. Guru mata pelajaran SMP</li> <li>k. Masa kerja PNS SD</li> <li>l. Masa kerja PNS SMP</li> <li>m. Pendidikan terakhir PTK SD</li> <li>n. Pendidikan terakhir PTK SMP</li> <li>o. Pensiun PNS SD</li> <li>p. Pensiun PNS SMP</li> <li>q. Sertifikasi PTK per Bidang studi SD</li> <li>r. Sertifikasi PTK per bidang studi SMP</li> </ul>	xlsx
2	Data siswa dan rombel	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rombongan belajar SD</li> <li>b. Rombongan belajar SMP</li> <li>c. Siswa berdasar Tingkat SD</li> <li>d. Siswa berdasar tingkat SMP</li> </ul>	xlsx
3	Jumlah sekolah dan ruang kelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kelas SD</li> <li>b. Ruang kelas SMP</li> </ul>	xlsx
4	Materi evaluasi dan DAK 2015 Aston	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bhn Pendidikan – Kebijakan Pengalokasian</li> <li>b. Optimalisasi DAK 2015</li> <li>c. Pelaporan via Aplikasi DAK online</li> <li>d. Pengadaan Alat Pendidikan</li> </ul>	pptx
5		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar guru honorer dan PNS SD SMP se Kabupaten Sumbawa</li> <li>b. Data guru se Kabupaten Sumbawa</li> <li>c. Data SMA SMK</li> <li>d. Data tenaga honor sekolah SMP</li> <li>e. Data guru honor sekolah SD</li> <li>f. Data guru Honor SMP1</li> <li>g. Data guru honor sekolah SD</li> <li>h. Data guru honor sekolah SMP1</li> <li>i. Data guru</li> <li>j. Prestasi Diknas</li> <li>k. Ruang kelas</li> </ul>	xlsx
6	Profil pendidikan	Profil-2015 ok print	xlsx

Soft Copy			
No.	Nama Folder	Nama File	Jenis
7	Renstra Diknas	Bab I, Bab II, Bab II-2, Bab III Isu Stratgetis, Bab III, Isu-isu Strategis, Bab IV Visi Misi, Bab IV, Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Bab V Rencana Program dan Kerangka, IKK Diknas (RPJM), IKK Diknas (RPJM)-2, Sekat bab	docx
		Lampiran SWOT Diknas, Renstra, Renstrav-2	xlsx
		Sistematika Penyusunan Renstra	pptx
		Matrix link, Matrix Matrix, Matrix Matrix IKU, Matrix, Renstra Dinas Diknas	pdf
8		DPA Diknas 2016	Pdf
9		LKPJ 2015-2016_Bappeda	xlsx
10		Rencana Kerja 2016	docx
11	RPJMD 2011–2015	Bab I s/d X	pdf
12	RPJMD 2016–2021	Bab I s/d X	pdf
13		DOK.LAKIP_KAB_SUMBAWA_2014	pdf
14		Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 NTB	pdf
15		Nilai UN dan data SMP A 2015 <a href="http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/C0049DE4-023C-E111-B77A-0351B3E63BDF">http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/C0049DE4-023C-E111-B77A-0351B3E63BDF</a>	
16		Nilai UN dan data SMP B <a href="http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/A0169AE4-023C-E111-9A18-6155321C0943">http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/A0169AE4-023C-E111-9A18-6155321C0943</a>	
17		Nilai UN dan data SD A <a href="http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/A0B21AE2-023C-E111-B511-53FFAC8D02E9">http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/A0B21AE2-023C-E111-B511-53FFAC8D02E9</a>	
Hardcopy/buku			
18		Jurnal Pendidikan SAMAWA Vol. 1 No. 1 Maret 2016	buku

Catatan:

Soft copy No. 1 s.d. 10 diperoleh dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa.

Soft copy No. 11 s.d. 12 diperoleh dari Bappeda Kabupaten Sumbawa.

## LAMPIRAN 12

**Tabel A7. Matrik Proses Pemetaan Pemangku Kepentingan**

No.	Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
A. Tahap Persiapan					
1	Merancang penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengacu pada <i>terms of reference</i> (TOR)</li> <li>Pemilihan sampel sekolah sebelum kunjungan lapangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyamakan persepsi tentang inovasi</li> <li>Merancang penelitian berdasarkan TOR</li> <li>Pendekatan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian</li> <li>Menunggu kepastian sekolah sampel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi dengan tim inovasi</li> <li>Rapat internal anggota tim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tujuan penelitian dapat dirumuskan</li> <li>Metode pengumpulan data disepakati</li> <li>Metode analisis data disepakati</li> <li>Daftar sekolah dan peta sekolah sampel diperoleh</li> </ul>
2	Menyusun instrumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tujuan penelitian yang jelas</li> <li>Metodologi penelitian jelas</li> <li>Pembagian tugas anggota tim dalam menyusun instrumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyamakan persepsi tentang berbagai definisi utama seperti pembelajaran dan inovasi daerah</li> <li>Pertanyaan yang sama muncul di bagian pertanyaan yang lain</li> <li>Penentuan data pendukung yang perlu dikumpulkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendiskusikan draf pedoman wawancara dan FGD sekaligus direvisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Draf instrumen siap diuji coba</li> </ul>
3	Pelatihan dan uji coba penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penentuan lokasi uji coba jelas</li> <li>Penentuan waktu uji coba jelas</li> <li>Izin penelitian dari wilayah uji coba</li> <li>Pemangku kepentingan yang akan diwawancarai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan waktu uji coba</li> <li>Pemangku kepentingan di wilayah uji coba ada yang tidak merespons</li> <li>Pedoman wawancara terlalu panjang sehingga memakan waktu lama</li> <li>Pengisian instrumen analisis masih membingungkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tim menyepakati lokasi dan waktu uji coba</li> <li>Dibuat tim kecil untuk menjajaki wawancara dengan pemangku kepentingan</li> <li>Mendiskusikan kembali instrumen penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi uji coba di Kabupaten Purwakarta</li> <li>Diperoleh kontak utama, yaitu Dinas Dikpora untuk mengontak dan mengatur wawancara dengan pemangku kepentingan</li> <li>Instrumen penelitian diperbaiki dengan mempertajam pertanyaan, menghilangkan pertanyaan</li> </ul>

No.	Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
					ganda, dan reorganisasi pengelompokan pertanyaan
B. Tahap Pengumpulan Data					
1	Menyusun daftar pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peneliti lokal mencari tahu lebih awal siapa yang akan diwawancarai (nama, jabatan, alamat kontak, dsb.)</li> <li>Daftar hadir peserta sosialisasi inovasi sebagai referensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informasi tidak lengkap</li> <li>Daftar hadir tidak mencakup semua pemangku kepentingan yang akan diwawancarai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peneliti lokal datang langsung</li> <li>Menghubungi tim Inovasi untuk mencari tahu kontak yang relevan</li> <li>Bertanya kepada informan yang sudah diwawancarai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informan yang diwawancarai dapat dikontak dan membuat janji wawancara</li> </ul>
2	Menghubungi pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peneliti lokal menghubungi pemangku kepentingan untuk menjelaskan tentang studi dan membuat janji wawancara (ada yang dikunjungi langsung, ada yang melalui telepon)</li> <li>Jadwal wawancara di tingkat sekolah dihubungkan oleh Kabid Dikdas Dinas Diknas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informan yang seharusnya diwawancarai berada di luar kota selama seminggu</li> <li>Terdapat calon informan yang mengelak diwawancarai dan menyerahkan kepada atasannya, padahal atasan tersebut sudah diwawancarai sebagai pemangku kepentingan yang lain (rangkap jabatan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengontak/mewawancarai informan yang masih satu lini</li> <li>Setelah ditemui dan dijelaskan secara rinci, akhirnya yang bersangkutan bersedia diwawancarai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jadwal wawancara bisa disepakati</li> <li>Seluruh pemangku kepentingan telah diwawancarai</li> </ul>
3	Pelaksanaan wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wawancara: sesuai dengan jadwal yang disepakati melalui telepon atau datang langsung ke pemangku kepentingan</li> <li>Penjelasan tentang studi</li> <li>Mengisi <i>informed consent</i></li> <li>Wawancara: direkam, dicatat, difoto</li> <li>Tim mendiskusikan hasil wawancara dan rencana berikutnya agar waktu penelitian cukup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wawancara dilakukan dua peneliti: satu sebagai penanya dan satu pencatat</li> <li>Pertanyaan mirip sehingga informan sedikit bingung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanya dan pencatat dilakukan bergantian</li> <li>Pertanyaan yang sudah dijawab tidak ditanyakan lagi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian besar pertanyaan dijawab informan</li> <li>Memerlukan waktu untuk memotong jawaban pada pertanyaan yang mana</li> </ul>
4	Pelaksanaan FGD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan Bappeda untuk menyetujui tempat, waktu, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peserta yang diwawancarai tidak hadir saat FGD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diwakilkan kepada seseorang dari SKPD yang sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya penambahan dalam pohon masalah</li> </ul>

No.	Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
		<p>calon peserta, serta teknis pelaksanaan FGD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan bahan FGD: analisis pohon masalah, analisis penyelesaian masalah, analisis pengaruh/ketertarikan pemangku kepentingan, jaringan pemangku kepentingan, kebijakan/inovasi daerah</li> <li>Peserta FGD merespon paparan di atas sesuai SKPD-nya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materi untuk FGD banyak dan yang diwawancarai tidak hadir sehingga dikhawatirkan diskusi tidak seluruhnya memverifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian peserta merupakan pejabat lama yang justru memverifikasi informasi yang diperoleh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perubahan posisi ketertarikan dan pengaruh pemangku kepentingan</li> <li>Verifikasi inovasi daerah khususnya inovasi jurnal</li> </ul>
5	Pengumpulan data sekunder	Daftar data sudah dipersiapkan	<p>Daftar kebutuhan data diserahkan ke bagian yang menangani data. Pada kenyataannya, data di kabupaten tersebar di SKPD, juga dalam SKPD data tersebar di berbagai seksi/bagian. Data dalam bentuk <i>soft copy</i>.</p>	Petugas pengumpul data di SKPD tidak masuk kerja dan meminta rekannya yang lain untuk "menyusur" pencarian data lagi	Data yang terkumpul tidak berurutan/tidak lengkap setiap tahun
C. Tahap Analisis Data					
1	Entri data	Catatan lapangan, verbatim wawancara/FGD, tersedianya tabel entri data	<p>Pelaksanaan wawancara mendalam dan wawancara kelompok di lapangan berlangsung hingga sore. Hal ini berpengaruh pada penulisan catatan lapangan. FGD berlangsung selama lima jam sehingga membuat penyelesaian catatan lapangan dan verbatim juga lama.</p>	Verbatim dilakukan oleh kantor/ <i>outsourc</i> e (dialihdayakan ke pihak luar).	Kekurangan penulisan catatan lapangan dilanjutkan di kantor
2	Analisis data	Entri data lengkap	Waktu yang sempit, banyak informasi	Analisis didasarkan diskusi di antara anggota tim	Temuan utama
3	Penyusunan laporan	Analisis data selesai, garis besar laporan	Waktu yang sangat mendesak, lampiran yang disertakan banyak	Pembagian tugas tim	Laporan kabupaten

## The SMERU Research Institute

Telepon : +62 21 3193 6336

Faksimili : +62 21 3193 0850

Surel : smeru@smeru.or.id

Situs web : www.smeru.or.id

Facebook : @SMERUInstitute

Twitter : @SMERUInstitute

YouTube : The SMERU Research Institute

